
5



**REFORMASI, PERUBAHAN
SOSIAL, RESTRUKTURISASI,
PEMEKARAN WILAYAH, DAN
KONDISI UNTAN**

BAB XXVIII

PEMEKARAN, KONDISI WILAYAH, DAN WEWENANG KHUSUS GUBERNUR¹

A. BAGIAN 1

Paling tidak ada dua macam pemekaran wilayah, yaitu Pemekaran Wilayah Kabupaten atau Wilayah Kota, dan Pemekaran wilayah Provinsi. Pemekaran Wilayah Kabupaten telah dan sedang berjalan dengan mulus diberbagai daerah termasuk di daerah ini, sedangkan pemekaran wilayah Provinsi sedang berproses. Ada tiga persepsi mengenai pemekaran wilayah yang disebut terakhir: persepsi mendukung, menolak sama sekali, dan persepsi diantara keduanya yang diembeli dengan persyaratan tertentu.

Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota.

Pemekaran wilayah kabupaten dan kota di KalBar telah diwacanakan sejak 1998 sebelum pemekaran menjadi isu nasional (Alqadrie, 1999; diperkuat oleh Alqadrie, 2005; 2008; lihat pula Alqadrie, Pontianak. Post, 23/5-2007:19; Equator, 14/5-2007:10). Makalah tersebut telah mewacanakan pemekaran 8 buah kabupaten dan 3 buah kota/kotamadya. Kalau wacana pemekaran ini seluruhnya terealisasi, dari 6 kabupaten dan 1 kota yang telah ada di KalBar sampai tahun 1998, maka seluruh kabupaten dan kota di daerah ini

¹ Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam Harian *Equator* terbitan *Sabtu*, 27 Oktober 2007, halaman 10. Artikel ini juga merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap wacana pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya (PKR) tentang perlunya wewenang khusus gubernur untuk menangani kawasan perbatasan bagi provinsi baik yang akan dimekarkan (PKR), seperti kawasan-kawasan perbatasan pada kabupaten Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, maupun provinsi induk (Provinsi Kalimantan Barat) seperti pada kawasan-kawasan perbatasan Kabupaten Sambas dan Bengl

berjumlah seluruhnya 18 buah terdiri dari 14 kabupaten dan 4 buah pemerintahan kota (Pemkot). Sekarang ini (sampai dengan artikel ini ditulis, 28/10-2007) kabupaten dan kota yang sudah disetujui pemekarannya oleh PemPus berjumlah 6 buah kabupaten dan sebuah pemerintah kota (Lihat Alqadrie, 1999; Alqadrie dalam Pontianak Post, 23/5-2007:19).

Dari 8 kabupaten dan 3 kota yang diwacanakan untuk dimekarkan, ternyata wilayah yang belum disetujui pemekarannya hanya 2 kabupaten, yaitu (1) Kabupaten Kapuas Utara (Kabupaten Perbatasan Timur Utara/Badau, nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Kapuas) dan (2) Kabupaten Sungai Raya (nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang, dan 2 Pemkot, yaitu (1) Pemkot Sintang (nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Sintang, (2) Pemkot Mempawah (nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak).

Pemekaran Wilayah Kabupaten Sungai Raya tampaknya masih mengalami kesulitan. Ketidakkompakan dalam menciptakan pemekaran ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kesulitan tersebut. Disatu pihak, sebagian masyarakat menginginkan wilayah Sungai Raya bergabung dengan Pemerintah Kota Singkawang, karena kedua wilayah ini memiliki kelompok etnis mayoritas yang sama. Di lain pihak, sebagian lagi menuntut Sungai Raya berdiri sebagai sebuah kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Bengkayang. Ini juga disebabkan Lembaga Legislatif dan Eksekutif kabupaten asal berkeberatan dengan pemekaran itu, sehingga PemPus belum dapat meneruskan proses pemekaran ini. Selain itu adanya kekhawatiran akan terjadi kosentrasi etnis di kawasan Sungai Raya yang berpenduduk mayoritas kelompok etnis Melayu.

Pemekaran Wilayah Provinsi Kapuas Raya.

Sejak 1998 sampai dengan 2005 saya sendiri masih belum setuju dengan pemekaran wilayah Provinsi Kapuas Raya dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Kekhawatiran akan timbulnya kosentrasi etnis mengingat kawasan Kapuas Raya dihuni oleh satu kelompok mayoritas tertentu. Kosentrasi etnis ini juga akan mendorong timbulnya dominasi

terutama dalam bidang social, ekonomi dan politik (2) Pengadaan menyeluruh tidak saja infra struktur fisik dan material seperti gedung-gedung kelembagaan dan kantor-kantor pemerintahan dan swasta lengkap seperti selayaknya sebuah kota provinsi. Pengadaan ini berkaitan dengan pembangunan sebuah ibu kota setingkat pemerintah kota termasuk jalan dan fasilitas public lainnya yang juga memerlukan biaya sangat besar. Pengadaan menyeluruh untuk mendukung kehidupan sebuah provinsi juga menyangkut pengadaan dan peningkatan sumberdaya manusia di berbagai bidang dan sector yang memakan biaya yang tidak kecil, sekitar antara Rp. 5 – 10 triliun (Alqadrie dalam Ptk Post, 23/5-2007:19) dan waktu yang cukup panjang.

Setelah mengadakan beberapa kali temu wicara, diskusi, seminar, dan pertemuan lainnya dengan instansi terkait termasuk dengan DepDagri, IIP, Himpunan Guru Besar Indonesia, mahasiswa beberapa universitas dan Percik, tampaknya ada kesungguhan PemPus untuk mengizinkan pemekaran wilayah provinsi. Dalam tahun 2006 – 2010 akan dimekarkan lagi sekitar 10 buah provinsi. Dengan pertimbangan kondisi khusus pada di KalBar yang memiliki kawasan perbatasan yang kumuh, kawasan hutan yang sedang mengalami kegundulan, taman nasional yang menghadapi kehancuran, lapangan kerja yang tidak bertambah sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, dan sebagainya, saya serta merta mendukung provinsi KalBar dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya.

Wewenang Khusus Gubernur.

Dalam rangka menyelamatkan dan membangun empat kondisi social alamiah yang memprihatinkan tersebut, kepala daerah yang dimekarkan hendaknya diberikan **wewenang khusus** untuk menangani kasus-kasus dan masalah di perbatasan secara langsung dan terpadu dengan tidak menunggu dan tergantung sepenuhnya pada PemPus. Pemberian dan penggunaan wewenang khusus ini merupakan salah satu pertimbangan agar pemekaran wilayah provinsi pada kawasan perbatasan didukung dan dapat diterima. Jadi,

perjuangan untuk meningkatkan pembangunan daerah, khususnya membangun kawasan perbatasan yang sekaligus menyelamatkan hutan dan taman nasional, dapat dilakukan bukan hanya dengan menggeolkan pemekaran, tetapi juga – mungkin ini yang penting—menuntut agar gubernur yang akan memimpin sebuah provinsi dengan kondisi khusus, seperti Provinsi Kapuas Raya yang akan dimekarkan dan Provinsi KalBar sebagai provinsi asal, diberikan wewenang khusus untuk menangani masalah-masalah dan kasus-kasus khusus.

PEMEKARAN, KONDISI WILAYAH, DAN WEWENANG KHUSUS GUBERNUR²

B. BAGIAN 2

Pemekaran wilayah provinsi yang memiliki kawasan perbatasan yang berhutan dan taman nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberian kewenangan khusus kepada gubernur baik bagi provinsi yang dimekarkan maupun provinsi asal. Kalau pemekaran itu tidak disertai dengan pemberian kewenangan khusus dimaksud, pemekaran wilayah provinsi tidak akan efektif dan –kalaupun tidak mau dikatakan-- tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Upaya menciptakan kawasan perbatasan sebagai halaman depan, bukan halaman belakang, hanya merupakan khayalan (*illusion*) belaka, tanpa adanya wewenang khusus. Dalam konteks inilah, saya sangat mendukung pemekaran wilayah provinsi baru, khususnya Kapuas Raya. Wewenang khusus untuk Gubernur Provinsi Kapuas Raya yang akan dimekarkan meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang dan Sanggau, sedangkan untuk Gubernur KalBar meliputi kawasan perbatasan Kabupaten Sambas dan Bengkayang.

Bakal Calon Gubernur?

Kalau inspirasi dan tuntutan ini terealisasi, kita juga masih perlu memikirkan tentang siapa yang akan menjadi gubernur dari provinsi baru ini. Rekan-rekan dari kalangan akademis, wartawan, para anggota LSM dan pengusaha tampaknya telah menemukan seorang bakal calon (BaLon) gubernur dimaksud. BaLon tersebut tidak saja memenuhi baik persyaratan pemerintahan dan birokrasi maupun telah dikenal baik oleh rakyat (*popularity*), tetapi juga mampu merangkul dan mendekati seluruh golongan, lapisan dan kelompok masyarakat, sehingga kecenderungan untuk

² Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam Harian *Equator* terbitan *Senin*, 29 Oktober 2007, halaman 10.

mengarah pada konsentrasi dan dominasi etnis, tidak akan terwujud. BaLon dimaksud yang sekarang sedang menduduki jabatan kunci pada salah satu kabupaten di daerah ini, justru berasal dari kedudukan bawah, pernah menjabat relative lengkap dalam struktur pemerintahan, dan terbukti mampu merangkul dan membina antar dan sesama kelompok etnis dan agama serta antar generasi.

KalBar cukup banyak memiliki kader pemimpin sehingga tidak perlu ada lagi pemimpin didatang dari PemPus atau daerah lain (*dropping of leader*) seperti pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, persyaratan lain yang diperlukan adalah profesionalisme, mampu melakukan terbaik dan berkarakter dapat dipercaya. Balon yang disebut di atas menurut beberapa kalangan juga memiliki persyaratan tersebut. Dengan wewenang khusus yang dimiliki BaLon ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pembangunan daerah di provinsi yang baru ini akan dapat segera dipacu dalam mendukung pembangunan nasional.

BAB XXXVII

KONDISI KHUSUS DAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU UTARA/BADAU³

Sebagai konsekuensi dari reformasi, rakyat dan pemerintah di daerah menginginkan wewenang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemerintahan yang otonom dan kesederajadan dengan daerah lain. Berbagai keinginan dan tuntutan didengungkan, termasuk tuntutan terhadap pemekaran wilayah. Pemekaran Wilayah Kabupaten telah dan sedang berjalan dengan mulus diberbagai daerah termasuk di daerah ini, sedangkan pemekaran wilayah Provinsi sedang berproses. Ada tiga persepsi mengenai pemekaran wilayah: persepsi mendukung, menolak sama sekali, dan persepsi diantara keduanya yang diembeli dengan persyaratan tertentu.

Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota.

Pemekaran wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat (KalBar) telah diwacanakan beberapa tahun sebelum wacana pemekaran menjadi isu nasional, yaitu sejak 1998/1999 (lihat makalah Alqadrie, 1999; 2005; 2007). Dalam tiga buah makalah tersebut pemekaran kabupaten telah diwacanakan sebanyak 8 (delapan) buah dan kota/kotamadya sebanyak 3 (tiga) buah. Kalau wacana pemekaran ini seluruhnya terealisasi, dari 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya yang telah ada di KalBar sampai 1998, maka

³ Artikel ini berisi sumbangan pemikiran penulis bagi upaya pemekaran Wilayah Kabupaten Kapuas Utara/Badau yang telah penulis wacanakan 1998 yang lalu (lihat Alqadrie, 1999). Artikel ini telah dimuat dalam Kolom “Interaktif” dalam *Harian Equator* terbitan Sabtu, 3 November 2007, hal. 10.

seluruh kabupaten dan kota di daerah ini akan berjumlah seluruhnya 18 buah terdiri dari masing-masing 14 kabupaten dan 4 (empat) buah pemerintahan kota. Sampai dengan artikel ini ditulis, 1/11-2007), kabupaten dan kota yang sudah disetujui pemekarannya oleh Pemerintah Pusat (PemPus) berjumlah 6 (enam) buah kabupaten dan 1 (satu) buah pemerintah kota, yaitu (1) Kabupaten Bengkayang (dimekarkan dari Kabupaten Sambas, (2) Landak (dimekarkan dari Kabupaten Pontianak), (3) Sekadau (dimekarkan dari Kabupaten Sanggau), (4) Kabupaten Melawi (dimekarkan dari Kabupaten Sintang), (5) Kabupaten Ketapang Utara/Sukadana (nama saat diwacanakan tetapi sekarang bernama Kabupaten Kayung Utara, pecahan dari Kabupaten Ketapang), dan (6) Kabupaten Kubu Batu Ampar/KaKuBatam (nama saat diwacanakan, tetapi sekarang bernama Kabupaten Kubu Raya, pecahan dari Kabupaten Pontianak. Kabupaten terakhir ini telah disetujui secara prinsip, dan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) tinggal persetujuan dari PemPus. Kemudian pemerintah kota (PemKot) yang telah disetujui adalah Kota Singkawang.

Dari 8 (delapan) kabupaten dan 4 (empat) kota yang diwacanakan untuk dimekarkan, ternyata wilayah yang belum disetujui pemekarannya adalah 2 (dua) kabupaten, yaitu (1) Kabupaten Kapuas Hulu Utara (Kabupaten Perbatasan Timur /Badau, nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Kapuas Hulu) dan (2) Kabupaten Sungai Raya (nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang, dan 2 (dua) pemerintahan kota, yaitu (1) Pemerintahan Kota Sintang (nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Sintang, PemKot Sintang dengan sendirinya akan diterima, jika Provinsi Kapuas Raya beridir), (2) PemKot Mempawah (nantinya ia merupakan pecahan dari Kabupaten Pontianak).

Pemekaran Wilayah Kabupaten Sungai Raya masih mengalami kesulitan, walaupun ia telah melalui proses peradilan. Hal ini disebabkan, disatu pihak, sebagian masyarakat menginginkan wilayah Sungai Raya bergabung dengan Kota Singkawang, karena faktor kedekatan geografis, administrative dan etnis. Di lain pihak, sebagian lagi menuntut wilayah Sungai Raya menjadi sebuah kabupaten yang berdiri

sendiri terpisah dari Kabupaten Bengkayang. Ini juga disebabkan Lembaga Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten induk merasa keberatan dengan pemekaran itu. Alasan lainnya dari penolakan ini adalah adanya kekhawatiran akan terjadi “kosentrasi etnis” di kawasan Sungai Raya yang berpenduduk mayoritas kelompok etnis Melayu. Kekhawatiran ini dibantah oleh para tokoh masyarakat di situ, karena selama ini mereka telah terbiasa dengan kehidupan multi etnis. Sebagian besar penduduk di kawasan yang mejorok ke dalam dan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bengkayang, Pontianak, Landak dan kota Singkawang, dihuni oleh anggota kelompok etnis Dayak, Bugis dan Madura. Karena itulah, kosentrasi etnis, tegas mereka, tidak akan terjadi.

Pemekaran Wilayah Kapuas Hulu Utara.

Pemekaran wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Utara/Perbatasan Timur/Badau yang saya wacanakan 1998/1999 telah menemukan titik terang. Kelancaran proses pemekaran ini disebabkan bukan saja oleh kekompakan seluruh lapisan masyarakat beserta tokoh-tokoh mereka, tetapi juga oleh kedudukannya yang sangat strategis baik karena terletak di kawasan perbatasan dengan Serawak dan KalTim, maupun karena memiliki dua taman nasional –Betung Karihun dan Danau Sentarum. Selain itu, Lembaga Legislatif dan Eksekutif kabupaten asal, Kapuas Hulu, sangat mendukung pemekaran itu. Semakin cepat wilayah ini dimekarkan semakin cepat pula Provinsi KalBar atau Provinsi Kapuas Raya yang akan dimekarkan memiliki kemampuan membangun kawasan perbatasan di daerah ini dalam mengurangi kesenjangan social ekonomi antara masyarakat di kawasan ini dengan kawasan Serawak. Selain itu, kelestarian hutan dan dua taman nasional tersebut dapat dipertahankan. Upaya ini hanya dapat dilakukan seandainya kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu dimekarkan menjadi satu kabupaten baru ((Lihat Alqadrie, 1999; Alqadrie dalam Pontianak Post, 23/5-2007:19), sehingga kawasan perbatasan dapat segera dijadikan halaman depan.

Bakal Calon Bupati?

Kalau inspirasi dan tuntutan ini terealisasi, apa yang perlu difikirkan adalah siapa yang akan menjadi bupati dari kabupaten baru ini. Rekan-rekan dari kalangan akademis, wartawan, para anggota LSM dan pengusaha tampaknya lebih cenderung mengharapkan bakal calon (BaLon) bupati dimaksud berasal dari daerah itu, lahir dan dibesarkan di kabupaten tersebut. Selain itu, BaLon tersebut diharapkan seorang yang memiliki pengalaman dalam sector pemerintahan dan birokrasi, serta memiliki pendidikan minimal Sarjana Satu (S1) dan telah dikenal baik oleh rakyat. Dengan memiliki persyaratan seperti itu, BaLon tersebut mampu merangkul dan mendekati seluruh golongan, lapisan dan kelompok masyarakat, sehingga kekhawatiran pada kosentrasi dan dominasi etnis, tidak akan terwujud. Disamping itu, ia akan mampu memecahkan masalah pelestarian taman nasional, hutan dan kesenjangan social ekonomi di kawasan perbatasan.

Optimisme bertambah jelas ketika rakyat di Kapuas Hulu Utara yang akan dimekarkan tampaknya telah melirik calon kepala Eksekutif mereka, paling tidak sebagai pelaksana tugas (PLT). Calon ini sebenarnya sedang menjadi pejabat penting, yaitu kepala sebuah Badan pada salah satu kabupaten Perbatasan di luar Kabupaten Kapuas Hulu. Ia dinilai memiliki reputasi sangat baik, jujur, sederhana dan merakyat tidak hanya di kalangan tempat ia bertugas tetapi juga di daerah kelahirannya yang akan dimekarkan.

BAB XXXVIII

HIPOTESIS 2020-AN, KONSEP PUTERA DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH, DAN GEO-ETHNO POLITICS DALAM PILKADA KALBAR⁴

A. BAGIAN 1

Dari banyak peninggalan positif dan negatif rezim ORBA, pertikaian atau konflik kekerasan (*violent conflicts*) merupakan salah satu warisan negatifnya. Konflik-konflik kekerasan atau pertikaian, seperti yang pernah dialami di Ambon, Poso, Kalteng, Kalbar, dan sebagainya, muncul dipermukaan sebagai akibat dari proses panjang (lihat Fisher, dkk. 2000) dari kekerasan tampak yaitu perilaku; dan kekerasan tak tampak seperti sikap, perasaan, dan nilai kekerasan; dan kekerasan struktural atau melembaga.

Kekerasan itu dibungkus rapih dengan faktor pemicu secara budaya (*culturally trigger factors*) seperti perbedaan budaya, agama, asal usul keturunan, dan etnisitas. Padahal faktor sejarah –perilaku penjajah yang memaksakan unsur nilai budaya dan agama tertentu terhadap penduduk setempat dan keberfihakan di bidang ekonomi dan politis kepada kelompok tertentu; faktor sosial –ketidakberdayaan hukum dan pendidikan yang bersifat elitis dan tidak demokratis; faktor ekonomi --penghisapan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara berlebihan serta ketidakadilan social ekonomi terhadap sebagian terbesar rakyat di daerah-daerah; dan faktor politik – pengekaln sistem politik dan pemerintahan yang sentralistis dan

⁴ Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan *Senin, 14 Mei 2007*, hal. 10. Pada artikel ini, penulis ingin menghubungkan antar Hipotesis 2020-an, Konsep Putera Daerah, Pemekaran wilayah, dengan Prinsip *Geo-ethno politics* dalam Pilkada KalBar.

pelaksanaan otonomi daerah setengah hati, ternyata lebih bertanggung jawab terhadap terjadinya kekerasan.

Pertikaian berdarah di Kalbar telah terjadi selama **empat priode** dalam **setiap 30-an tahun sekali**, yaitu: **1900-an; 1930-an; 1960-an**, dan **1990-an** (Alqadrie (2000)). Penulis menghipótesisikan: **Pertikaian besar-besaran akan terjadi lagi di Kalbar pada 30-an tahun mendatang, yaitu pada 2020-an**, jika: (1) Pemerintah pusat (Pempus) tidak memperhatikan daerah ini dengan memberikan Otda setengah hati; (2) Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten atau kota) tidak melaksanakan Otda sesuai dengan hak dan kewajiban mereka bagi kepentingan rakyat; dan (3) Para elit politik dan ekonomi hanya mementingkan diri mereka sendiri dengan mengenyampingkan kepentingan rakyat.

Hipótesis tersebut tidak untuk dibuktikan kebenarannya, sebagaimana pada Huntington (2000) yang menghipótesisikan perbenturan peradaban (*clash of civilization*) antara Timur dan Barat. Saya hanya bermaksud mengantisipasi ke depan agar kekerasan tidak terulang kembali. Antisipasi lain yang lebih konkrit adalah upaya merealisasikan konsep putra daerah dan upaya pemekaran daerah kabupaten dan kota, bukan provinsi.

Konsep Putera Daerah/Bumi Putera.

Reformasi menghasilkan banyak hal baik konstruktif maupun negatif terutama eksklusivisme, seperti misalnya provinsialisme, daerahisme, etnosentrisme dan primordialisme sempit yang didengungkan melalui isu putera daerah (walaupun segi negatif seperti ini terutama di luar Kalimantan sudah lama ada jauh sebelum era reformasi). Pada hakekatnya putera daerah, yang dulu --bahkan di Malaysia-- dikenal dengan istilah *bumi putera*, adalah semacam pandangan yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang-orang atau penduduk “asli” untuk berkiprah di daerah mereka sendiri.

*HIPOTESIS 2020-AN, KONSEP PUTERA DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH, DAN GEO-ETHNO POLITICS DALAM PILKADA KALBAR*⁵

B. BAGIAN 2

Pengertian asli ini ditafsirkan secara beragam. Untuk mengurangi perbedaan yang mungkin timbul, sejak 1998 Kalbar telah memiliki konsep tersebut.

Konsep putera daerah Kalbar (lihat Alqadrie, 1999) dikembangkan dari cikal bakalnya yang telah ada sejak era Sultan Abdurahman Al-Qadrie dari Kesultanan Qadariyah dan mengandung 3 (tiga) indikator. Pertama, berkaitan dengan ikatan darah secara tegak lurus dari atas ke bawah (*vertically blood unity indicators*). Berdasarkan indikator ini, putera daerah Kalbar hanya terdiri dari kelompok etnis **Dayak** dan **Melayu**. Kedua berhubungan dengan kelahiran (*birth indicator*). Ini berarti bahwa mereka yang dikategorikan sebagai putera daerah Kalbar menyangkut pula mereka yang dilahirkan dan tetap berada di situ. Ketiga berkaitan dengan lamanya bertempat tinggal (*domicile indicator*) secara terus menerus di daerah ini. Ini menunjukkan bahwa putera daerah Kalbar ialah mereka yang telah berada di daerah ini paling kurang 1 (satu) generasi, yaitu 25 tahun. Mereka yang memenuhi indikator kedua dan ketiga ini adalah anggota kelompok etnis manapun, datang dari manapun dan dari keturunan apapun, tidak hanya kelompok etnis Dayak dan Melayu.

Konsep ini menunjukkan pada fakta bahwa di satu fihak masyarakat Kalbar tidak saja menerima prinsip kemajemukan (*pluralism*) sebagai *de facto* atau apa yang telah ada (*das sein*), tetapi juga melaksanakan ideologi multikulturalisme yaitu menerima, menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan pendapat, nilai budaya dan keyakinan, sebagai suatu yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*). Di lain fihak, konsep

⁵ Artikel ini merupakan bagian kedua dari tiga tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam Harian *Equator* terbitan *Selasa, 15 Mei 2007*, hal. 10.

ini cenderung menimbulkan kesadaran berbangsa (*national consciousness*), sehingga ia dapat mencegah hipotesis 30-an tahun mendatang, yaitu hipotesis 2020.

Pemekaran Wilayah.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu dari beberapa upaya konkrit untuk mencegah pertikaian etnis, sekaligus menciptakan dan meningkatkan kesadaran dan kesetiakawanan berbangsa (*national solidarity and consciousness*). Kesadaran ini merupakan wujud dari suatu masyarakat baru yang terintegratif secara nasional (*a nationally integrated new society*) sebagai kolektivitas dari masyarakat lama (*old societies*) [Clifford Geertz, 1990] yang berasal dari kesadaran dan kesetiakawanan etnis (*ethnic solidarity dan consciousness*). Dalam konteks ini, pemekaran wilayah yang diutamakan di Kalbar adalah pemekaran kabupaten atau kota, bukan provinsi, karena pemekaran tersebut lebih memungkinkan timbulnya kesadaran dan kesetiakawanan nasional.

Akan tetapi, proses positif ini cenderung akan berbalik haluan ke arah kesadaran dan kesetiakawanan etnis yang "lebih sempit," seperti kasus Aceh dan Papua yang ingin merdeka dan kasus pertikaian seperti antara lain Kalbar, Kalteng, Ambon dan Poso, jika keserakahan dan ketidakadilan masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah dan NKK –saya lebih menyukai istilah ini daripada KKN—masih dipraktekkan oleh para pejabat. Arah berlawanan itu terjadi justru bukan hanya karena faktor primordialisme. Kasus-kasus yang mengancam integrasi nasional dan sosial, bahkan keamanan dunia, lebih merupakan reaksi dan jawaban spontan dari ketidakadilan dan keserakahan.

Dalam kaitan dengan pemekaran wilayah, sejak 1998 saya telah mewacanakan lebih pada pemekaran kabupaten/kota ketimbang pemekaran provinsi (Lihat Alqadrie, 1999).

*HIPOTESIS 2020-AN, KONSEP PUTERA DAERAH, PEMEKARAN WILAYAH, DAN GEO-ETHNO POLITICS DALAM PILKADA KALBAR*⁶

C. BAGIAN 3

Motif utama pemekaran kabupaten dan kota, sebagai prioritas utama adalah untuk menghilangkan kesan bahwa Pempus dengan Otonomi daerah (Otda) lebih banyak memberi perhatian kepada pemerintah daerah (Pemda –Pemprov, Pemkab dan Pemkot), daripada kepada rakyat di daerah, padahal Otda sebenarnya, menurut Syamsuddin Haris (2001) adalah otonomi yang lebih ditujukan untuk kepentingan rakyat di daerah, dan bukan hanya untuk Pemda. Selain itu, pemekaran kabupaten/kota dapat berfungsi mengurangi ketidakadilan kasar (*vulgar injustice*) Pemerintah Pusat (Pempus) terhadap rakyat dan pemerintah di daerah yang memperlakukan Otda masih dengan "kepala dilepas-tapi ekor dipegang." Motif pemekaran ini juga adalah untuk secara konkrit merealisasikan konsep putera daerah pada mana rakyat di daerah Kalbar, dari manapun dan dari anggota kelompok etnis apapun mereka berasal, memiliki kesempatan seluas-luasnya memimpin dan menjalankan pemerintahan sendiri di bawah naungan NKRI tanpa harus menunggu dropping pemimpin dari luar Kalbar seperti pernah terjadi di daerah ini selama ini.

Pilkada dan Geo-ethno politics.

Dengan pemekaran kabupaten/kota, kelompok etnis mayoritas diseluruh wilayah Kalbar dari manapun dan dari anggota kelompok etnis apapun mereka berasal diharapkan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri mereka secara langsung sebagai pemimpin rakyat di daerah, dengan tidak berdasarkan pada prinsip etnisitas semata, tetapi pada profesionalisme dan kemajemukan (*pluralism*). Untuk itu,

⁶ Artikel ini merupakan bagian ketiga dari tiga tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan Rabu, 16 Mei 2007, hal. 10.

dalam PILKADA tingkat kabupaten, kota dan provinsi, para Bakal calon (Balon) Bupati, Walikota dan Gubernur perlu sekali mempertimbangkan dan melaksanakan kebijakan berbagi kekuasaan (*power sharing*) berdasarkan prinsip politik kawasan-etnis (*geo-ethno politics*) dalam mencari Balon wakil pendamping dan para pembantu mereka di pemerintahan.

Ini berarti bahwa kalau para Balon Bupati/Walikota dan Gubernur berasal dari anggota kelompok etnis D (*ethno politics*) dan dari kawasan P (*geo politics*), misalnya, mereka hendaknya mencari pendamping dari anggota kelompok etnis M yang bukan berasal dari kawasan P. Begitu juga sebaliknya, para Balon yang berasal dari anggota kelompok etnis M dan dari kawasan K, misalnya, hendaknya mencari pendamping dari anggota kelompok etnis D yang berasal dari luar kawasan K. Kebijakan *power sharing* berdasarkan *geo-ethno politics* hendaknya diperkuat pula dengan penyusunan para pembantu mereka untuk mengisi struktur pemerintahan atau struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang terdiri dari campuran dari berbagai kelompok etnis, asal usul keturunan dan wilayah dengan berlandaskan pada profesionalisme yang berlandaskan pada prinsip *the right men on the right places*, bukan semata-mata pada primordialisme sempit dan kebijakan emosional balas dendam etnis. Kalau ini terjadi pada PILKADA Kalbar, pemekaran provinsi tidak diperlukan lagi, karena Pemprov dapat menjadi payung yang menaungi rakyat Kalbar yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, lapisan, golongan, asal usul keturunan dan daerah, serta profesi dan keahlian.

Kalau kebijakan *power sharing* dan prinsip *geo-ethnic politics* ini dapat dilaksanakan dalam PILKADA secara konsekuen, pemekaran kabupaten dan kota tidak akan menjadi arena kosentrasi etnis atau pemerintahan primordialistis sempit. Pemekaran semacam ini sekaligus akan menghindari terwujudnya hipotesis 2020 yang menghantui rakyat Kalbar, dan sebaliknya akan memperkuat semangat nasionalisme. Kondisi seperti ini akan sulit terbangun dalam pemekaran provinsi. Pemekaran dalam konteks ini pada mana Provinsi Kalbar diwacanakan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) provinsi lagi --Kapuas Raya dan

Kalbar Utara-- bukan saja akan terjadi pemborosan terhadap penghasilan daerah sehingga akan mematikan provinsi induknya, tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat di wilayah-wilayah pemekaran, dan hanya untuk kepentingan ekonomi politik sempit jangka pendek bagi para elit dan *blukar* politik (*political brockers and elites*) di daerah maupun di Pusat. Pemekaran provinsi juga tidak memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintah daerah terhadap rakyat, bahkan akan menciptakan sebuah arena pemusatan etnis (*ethnic cocentration*) dan primordialisme yang mengancam persatuan dan kesatuan. Kalau Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Riau, yang memiliki masing-masing luas wilayah sekitar 1 ½ kali dan 1 ¼ kali serta kekayaan 10 kali dan 6 kali dibanding Kalbar, bertekad tidak akan memekarkan provinsi mereka, pemekaran kabupaten dan kota di Kalbar menjadi alternatif utama yang perlu dilaksanakan ketimbang pemekaran provinsi.

BAB XXXIX

MORKES EFFENDI “SIAGIAN” (?) DAN FENOMENA PILKADA: KONSEP PUTERA DAERAH⁷

Dalam surat pembaca: “Untuk Pak Morkes Effendi A. Siagian” (Pontianak Post 21/2 – 2005), Bupati Ketapang mendapat tambahan nama marga Batak Toba, “Siagian”, dan dipertanyakan apakah ia seorang Melayu? Pengurus MABM Ketapang sangat keberatan dengan berita yang dianggap sangat tendensius itu. Sang bupati, yang dianggap berhasil membangun dan berjaya meningkatkan persatuan antar kelompok etnis di daerah ini, tenang-tenang saja menghadapi isu tersebut dan mengatakan: “Sumber paling tahu asal usul keturunan saya adalah masyarakat Kampung Luar, Pontianak dan Kampung Bintang Musir, Ketapang,”

Apa pasalnya sang Bupati, yang dikenal sebagai Melayu dan ketua MABM, dinyatakan memiliki nama “Siagian” dan diragukan kemelayuannya? Banyak fihak mengaitkan surat pembaca tersebut dengan politik praktis dan ingin mengubah opini yang merugikan fihak kepada siapa surat pembaca itu ditujukan dan menguntungkan fihak lain dalam Pilkada bulan Juni nanti.

Tulisan ini tidak bermaksud membela atau merugikan salah satu fihak, tetapi ingin mengemukakan fakta agar Pilkada nanti dapat mengedapankan *fair play*, sehingga ia dapat menjadi arena kompetisi yang bersih dan jujur sehingga rakyat dapat memilih pemimpin yang mampu, professional,

⁷ Artikel ini telah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Umum Pontianak Post* terbitan 26 Pebruari 2005, halaman 10.

mau bekerja keras dan pernah terbukti memiliki hasil karya positif bagi daerah ini.

Ada tiga perspektif dalam konsep putera daerah (Alqadrie, 2000) yang dapat mengkategorikan seseorang sebagai putera daerah sehingga ia memiliki hak dan kewajiban sama untuk berperan aktif dalam pembangunan, yaitu **perspektif: heriditari** atau **geneologis** (*genealogical or hereditary perspective*), **kesejarahan** atau **kelahiran** (*historical or born perspective*), dan **domisili** (*domicile perspective*).

Perspektif Asal Usul Keturunan atau Hereditari atau Geneologis.

Indikator pertama dari konsep putera daerah adalah hubungan darah atau ikatan geneologis secara vertikal dari garis ayah sebagai anggota kelompok etnis mayoritas yang dianggap “asli” dan yang telah sangat lama mendiami daerah/kawasan tersebut. Berdasarkan kriteria ini putera daerah Kalbar atau Ketapang adalah anggota kelompok etnis Dayak dan Melayu. Apakah Morkes Effendi termasuk dalam kategori ini?

Menurut para saksi hidup Ayah dan kakek Morkes Effendi adalah Melayu campur Banjar bergelar Gusti, bernama Adenan bin Gusti Akhmad bin Gusti Arsyad. Mereka tidak pernah menggunakan gelar tersebut. Itu tidak berarti kemelayuan mereka diragukan, tidak juga berarti Morkes kehilangan hak dan kewajibannya sebagai putera daerah.

Perspektif Kesejarahan atau Kelahiran.

Perspektif kedua berasal dari konsep sosiologi mutakhir yang mengandung keadilan. Putera daerah berdasarkan kategori ini adalah mereka yang pernah dilahirkan, hidup dan mengabdikan diri sampai akhir hayat mereka di Kalbar, tidak peduli dari kelompok etnis manapun mereka. Morkes Effendi termasuk juga ke dalam kategori ini, walaupun ada yang “meragukannya” sebagai Melayu.

Pertemuan, Kamis malam, 24/2- 2005, diprakarsai oleh MABM Ketapang dan keluarga besar Almarhum Sy. Husin Alkadrie gelar Pangeran Patih bin Sultan Sy. Hamid I Alkadrie,

mengungkapkan Morkes, nama aslinya Marekas, Effendi adalah anak Adenan yang diangkat anak ketika berumur 5 tahun oleh Sy. Husin Alkadrie. Pangeran Patih pada saat itu beristeri tiga orang. Dari isteri pertamanya, Syf. Maimunah Barakbah atau **cabang pertama** dari keluarga besar Pangeran Patih Kampung Luar, ia memiliki seorang anak perempuan bernama Syf. Hadijah yang kawin dengan Sy. Akhmad Alkadrie. Perkawinan tersebut menghasilkan seorang anak laki-laki bernama Sy. Mustafa Alkadrie. Untuk teman bermain cucu tunggalnya, Pangeran Sy. Husin Alkadrie mengangkat Adenan sebagai anak/cucu angkat. Sy. Harun bin Sy. Mustafa Alkadrie, salah seorang anak laki-laki dari 9 (sembilan) anak Sy. Mustafa, hadir pada malam itu mewakili cabang pertama.

Dari isteri kedua, Nyai Antong Imas (Nek Mas) berasal dari Kerajaan Banjar, Sy. Husin Alkadrie tidak mempunyai keturunan. Mereka mengangkat beberapa anak bernama Maimunah, Rugayah (Nek Uteh), Salbi dan Srie Rejeki. Anak angkat yang disebut pertama yang berasal dari Bogor dan diangkat anak ketika berumur 7 tahun, dikawinkan dengan Syarif Achmad Muhammad Alqadrie. Kedua pasangan ini memperoleh 6 (enam) orang anak. Anak bungsu dari keenam anak pasangan tersebut adalah penulis sendiri. Dua anak angkat disebut terakhir, Sri Rejeki dan Salbi dikawinkan oleh Pangeran Patih, dan memperoleh empat orang putera dan seorang puteri. **Muhammad** alias **Bujang** bin Salbi, putera tertua Salbi atau cucu angkat Pangeran Patih hadir pada pertemuan itu mewakili **cabang kedua** dari keluarga Sy. Husin Alkadrie, mengungkapkan asal usul Morkes bin Adenan.

Dari isteri ketiganya, Aisyah binti H. Adam (Mak Enteng), disebut **cabang ketiga**, Pangeran Patih mempunyai anak, Syf. Pajenah binti Husin Alkadrie sekarang masih hidup, dan Sy. Hamid bin Husin Alkadrie, telah meninggal dunia. Sy. Hamid memiliki dua orang putera dan enam orang puteri. Anak laki-laki kedua dari Sy. Hamid Alkadrie, bernama Sy. Husin Alkadrie, S.P. bin Sy. Hamid bin Sy. Hussein Alkadrie, hadir pada pertemuan malam itu, dan bersedia pula membuat kesaksian.

Perspektif Lamanya Bermukim.

Perspektif ketiga ini ditentukan oleh indikator lamanya bermukim, yaitu minimal 25 tahun atau satu generasi dengan tidak memperhatikan dari kelompok etnis manapun mereka. Seseorang yang telah bertempat tinggal di satu daerah selama minimal 25 tahun dan mengabdikan terus menerus di tempat itu, dapat dikategorikan sebagai putera daerah. “Apa yang salah dengan Siagian? Bukankah Kalbar lebih bersifat multi etnis dan lebih longgar dalam menerima kelompok etnis dari luar Kalbar ketimbang daerah lain?” “Apakah saya tidak boleh memegang jabatan politik atau karir, sedangkan ayah saya telah lahir dan mengabdikan di daerah ini?”, tanya rekan saya, Abdullah Sitompul, putera Sumatera kelahiran Kalbar (Pusakebar). Kriteria ketiga ini merupakan jawaban atas pertanyaan Sitompul yang merasa bukan putera Batak Toba lagi, sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban sama dengan putera daerah Kalbar berdasarkan kriteria pertama dan kedua. Morkes dan Sitompul juga termasuk putera daerah menurut kategori ini.

Konsep ini telah lama “dilaksanakan” melalui *dropping* pejabat Pusat dalam mengisi jabatan karir dan politis di Kalbar melalui “kebijakan” *top down*. Kenyataan itu dimulai ketika Kalbar kehilangan satu generasi pemimpin, termasuk para Sultan dan pemimpin multi etnis lainnya, korban kekejaman Jepang, (Alqadrie, 2004; Yanis, 1983), namun konsep ini baru disosialisasikan tahun 1997 lewat media massa (Pontianak Post, 1999), dan kegiatan akademis lainnya. Implementasi konsep ini menunjukkan masyarakat Kalbar lebih tidak bersifat provinsialis, kesukuan sempit dan primordialis lainnya dibanding dengan Sulut, Sulsel, Bali, Jawa, NTT, Sumsel, Sumbar, Sumut, Aceh dan sebagainya. Mempersoalkan asal usul keturunan seseorang dalam pengisian struktur pemerintahan tanpa memperhatikan komitmen, kemampuan dan karya seseorang, berarti kita telah mundur 100 tahun.

BAB XL

*KETERPURUKAN PLN, OTDA, DAN HARGA DIRI*⁸

Keterpurukan Indonesia tampaknya terjadi diberbagai bidang kehidupan seperti di bidang social, ekonomi, politik dan Pertahanan Keamanan. Padahal, dulunya bangsa ini pernah disegani oleh kawan dan lawan di dalam dan di luar negeri, justru pada saat ia belum banyak menggali sumberdaya alam maupun belum memiliki perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik dan industri-industri raksasa. Kenapa sekarang kita mengalami keterpurukan hampir dalam segala bidang kehidupan? Akan tetapi keterpurukan di PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) [Persero] melengkapi keterpurukan tersebut, yang membuat bangsa ini dicemooh dan tidak lagi disegani oleh bangsa lain.

Keterpurukan yang Menyakitkan.

Keterpurukan telah lama terjadi di PLN, bahkan sepanjang era OrBa. Tulisan ini ingin melihat masalah ekteren perusahaan ini, bukan interen, yaitu bagaimana ia, yang seharusnya melayani kepentingan public (*how to serve public interests*), dengan pelayanan yang prima (*primary public service*), ternyata telah menimbulkan masalah publik. Masalah eksternal PLN adalah bahwa frekuensi dan kualitas berfungsinya jaringan listrik pada PLN di KalBar, khususnya di Kota Pontianak, bagi berbagai keperluan masyarakat, sangat kecil/rendah. Dalam sepanjang hari, sepanjang minggu atau bulan, perusahaan ini hanya mampu memberi

⁸ Artikel ini sebagai sumbangan pemikiran kepada PT. PLN (Persero) Wilayah KalBar agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan mereka kepada masyarakat KalBar, pernah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Pontianak Post* terbitan Rabu, 10 Oktober 2007, halaman 19.

aliran listrik bagi langganannya paling banyak sekitar 40% dari seharusnya.

Catatan harian yang pernah saya buat mengenai hal ini sejak bulan Juni 2007 menunjukkan bahwa kinerja PLN di KalBar sangat memprihainkan. Perusahaan ini telah tidak menyalurkan aliran listrik ke para langganannya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya adalah sebagai berikut: Dari awal Juni s/d akhir September 2007 terjadi pemadam listrik pada setiap hari dari pagi sampai menjelang magrib. Bahkan *byar-pet* terjadi beberapa kali sehari sepanjang hari dan malam. Dalam bulan Ramadhan (12/9 s/d 7/10-2007) pemadaman listrik terjadi juga sepanjang hari pada setiap hari. Namun pemadaman listrik yang menyakitkan terjadi secara tidak lagi terkontrol yaitu sepanjang siang hari sampai tengah malam, dan pada saat sore hari sampai subuh hari. Ini mengakibatkan umat Islam sangat terganggu dalam menunaikan ibadah puasa, karena pemadaman listrik terjadi pada saat berbuka puasa dan makan sahur.

Berbagai Dampak Negatif.

Keterpurukan di tubuh PLN, terutama pelayanan public yang rendah dalam kaitan dengan pemadaman listrik, menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat.. Tingginya frekuensi pemadaman listrik menyebabkan kevakuman dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat, seperti dalam bidang ekonomi yaitu rendahnya kuantitas dan kualitas produksi dalam segala sektor. Ini berdampak pada rendahnya penghasilan negara sebagai akibat rendahnya ekspor produk industri, pabrik dan perusahaan dan menurunnya kinerja penduduk dalam sector jasa.

Sering matinya listrik juga berpengaruh terhadap kegiatan dalam sector pendidikan. Pada tingkat pendidikan tinggi saja pada mana kegiatan dan proses belajar-mengajar dilakukan dengan menggunakan alat eletronika, computer dan in-focus, matinya listrik setiap hari telah mengganggu kehidupan akademis. Jadi keterpurukan di sektor pendidikan tidak terlepas pertanggungjawaban PLN dalam pembinaan dunia pendidikan.

Tingginya frekuensi pemadaman listrik sepanjang hari dalam waktu cukup panjang (06.15 atau 09.00 s/d 17.00 atau bergantian 13.00 atau 16.30 s/d 04.00) dan seringnya aliran listrik itu bergantian padam dan hidup dalam waktu pendek diantara periode waktu pemadaman itu, tidak saja menyebabkan terganggunya seluruh aktivitas masyarakat. Pendidikan dan kegiatan belajar di rumah sebagai dasar dari pendidikan menyeluruh, menjadi hancur berantakan. Tingginya frekuensi pemadaman listrik sebagai perwujudan dari rendahnya kinerja dan buruknya peralatan PLN juga mengakibatkan rusaknya alat-alat keperluan rumah tangga dan industri, seperti mesin cuci, lemari pendingin (*refrigerator/coldcash*), pemasak nasi (*ricecooker*), computer dan alat lain ikutannya, dan mesin dan fasilitas pabrik. PLN tidak pernah bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat yang ia lakukan secara sadar. Pemadaman listrik juga sering terjadi sepanjang malam hari, yaitu pada saat-saat berbuka puasa, sahur dan bertepatan dengan waktu sembahyang 5 waktu. “Perusahaan Lilin Negara (PLN) ini,” kata sebagian besar masyarakat, “telah menghancurkan kepentingan masyarakat dan menterpurukkan bangsa.

Pelanggar HAM dan Kehilangan Religiositas.

Dalam melaksanakan tugasnya ada kesan PLN bertindak otoriter dan tidak *meng-uongke-uong*/tidak memanusiasikan manusia (*dehumanize people/human beings*) dan kehilangan rasa keberagamaan (*religiosity*). Padahal dalam era reformasi ini, karakter otoriter dan pelanggaran HAM sudah harus diakhiri. Masyarakat membayar kewajiban mereka sebagai pelanggan, tetapi mereka tidak pernah memperoleh hak-hak mereka.

Alasan klasik PLN adalah bahwa terganggunya aliran listrik disebabkan layang-layang, padahal layang-layang tidak dimainkan pada malam dan subuh hari waktu sahur dan bersahur puasa? Alasan lain yang sulit dimengerti adalah bahwa mesin listrik pada PLN sudah tua dan kurang atau tidak cukup jumlahnya. Kalau alasan ini benar, mengapa PLN tidak membeli mesin baru dan bukan mesin bekas pakai? Bukankah para pelanggan rumah tangga, pabrik-pabrik dan

industri besar membayar biaya listrik mereka setiap bulan? Mengapa PLN katanya selalu merugi seperti badan usaha milik Negara lainnya?

Analisis ekonomi politik (*political economic analysis*) para pengamat sosiologi ekonomi (Rachbini, 1990; Caporaso dan Levine, 1992; Kannan dan Pillai, 2001) menunjukkan ada semacam mekanisme atau proses social politik dan kelembagaan suatu negara yang menyebabkan elit politik dan ekonomi menguasai dan memonopoli sumberdaya yang langka atau bahkan badan usaha milik negara melalui kerjasama yang “rapi” antar mereka dengan para pengelola atau pejabat badan usaha tersebut yang ditujukan bagi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Dalam konteks ini, badan usaha seperti itu berfungsi hanya sebagai “sapi perahan.”

OTDA dan Harga Diri Bangsa.

Tidak semua badan usaha milik negara bertindak seperti itu, namun tidak adanya pelayanan publik yang baik ditambah dengan kondisi selalu merugi mendorong para ahli mengarahkan analisis mereka ke situ. Sinyalemen adanya penyalahgunaan wewenang para pejabat inti PLN di Jakarta yang merugikan Negara sebesar lebih dari Rp. 120 miliar seperti diungkap oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* (Kompas, 6/10-2007:4) membuktikan pernyataan di atas. Penyalahgunaan wewenang yang terjadi di PLN Pusat dan di daerah, telah mencompang-campingkan PLN daerah. Otda yang menjadi dasar demokrasi, kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, tampaknya, tidak pernah menyentuh tubuh PLN. Perusahaan ini sangat sentralistis sehingga disinyalir tidak membantu perjuangan PemProv dan PemKab/Pemkot bersama DPR mereka masing-masing dalam menyejahterakan rakyat di daerah.

Berbagai keluhan rakyat dan PemDa tidak pernah digubris, dalam bentuk baik demonstrasi seperti terjadi di Medan (Kompas, 4/10-07:22) dan di Pontianak (Kompas, 6/10-07:22; Ptk. Post, 1/10-07:4; 7/10-07:21) –namun sangat disesalkan aksi itu mengarahkan anarki)-- maupun surat pembaca dan teguran dari Badan Legislatif dan Eksekutif. Ini

menunjukkan bahwa PLN bukan hanya kebal hukum dan tidak merasa ikut bertanggungjawab dalam pembangunan bangsa dan daerah KalBar, karena mungkin ia merasa tidak berada dalam system social, ekonomi dan politik daerah ini, tetapi juga, seperti diperbincangkan oleh banyak mahasiswa UNTAN dan anggota masyarakat Pontianak, PLN seakan tidak memiliki harga diri (*dignity*). Semoga kedepan PLN Kalbar dapat menjadi lebih baik.

BAB XLI

RESTRUKTURISASI PLN DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH⁹

A. BAGIAN 1

Hal sangat "mengejutkan" terjadi 8 Januari 2008, sekitar 3 bulan lalu. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. PLN (Persero) [selanjutnya disebut PLN] 2008 mengamankan Direksi untuk melakukan restrukturisasi yang terdiri dari 3 (tiga) hal: (1) restrukturisasi korporat dengan membagi bidang kegiatan PLN menjadi 4 (empat) bidang, yaitu: (a) Pembangkitan, (b) Transmisi, (c) Distribusi, dan (d) Retail; (2) restrukturisasi itu juga mewajibkan perusahaan mengadakan pemisahan 2 (dua) wilayah kerja: Jawa, termasuk Madura dan Bali, dan Luar Jawa, semua wilayah Indonesia di luar daerah tersebut; (3) perubahan peraturan fasilitas kesehatan

Amanah restrukturisasi ini mungkin dianggap sebagai "peristiwa awal 2008 yang sangat kontroversial" oleh sebagian warga PLN, sehingga ia menuai protes dan unjuk rasa di kalangan karyawan PLN (namun ini mungkin tidak mengejutkan masyarakat dan pelanggan PLN, karena mereka menganggap restrukturisasi yang merupakan perwujudan dari perubahan sosial (*social change*) dan bagian tak terpisahkan (*integral part*) dari proses reformasi, perlu segera dilaksanakan dan harus didukung secara konsekuen.

⁹ Tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran penulis kepada para anggota Serikat Pekerja (SP) dan para peserta Seminar dan Lokakarya (SemiLoka) yang diselenggarakan oleh Panitia yang tergabung dalam SP PT.PLN (Persero) Wilayah KalBar dengan Tema Restrukturisasi PLN: "Antara Kehancuran Total dan Keberfihakan pada Masyarakat" di Auditorium UNTAN, 12 Maret 2008. Artikel ini sebagai ringkasan dari makalah penulis yang disajikan pada SemiLoka tersebut adalah bagian pertama dari dua tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan Rabu, 12 Maret 2008, halaman 10.

Aneh bin Ajaib.

Selama lebih tiga dekade, kendatipun mendapat prioritas utama, bersama dengan sektor pertanian dan industri, dan sebagai dasar dari aktivitas pembangunan nasional REPELITA, "hasil produksi" PLN yang menjadi "kebanggaan" kita, berupa penerangan listrik, pendistribusiannya, pelayanan kepada pelanggan dan kontribusinya bagi pembangunan daerah, "**belum** pernah benar-benar beres" bahkan mengecewakan para langganannya. Kekecewaan para langganan terutama di luar Jawa, lebih khusus lagi di KalBar, sebaliknya **tidak** menjadi hal yang kontroversial, namun menyakitkan dan menimbulkan unjuk rasa masyarakat. Bahwa, ketidakberesan ini **belum** pernah mendapat perhatian sungguh-sungguh dari Direksi, unsur pimpinan dan para karyawan PLN, apalagi sampai menuai protes dan unjuk rasa dari kalangan Serikat Pekerja (SP) PLN sebagai bentuk simpati kepada para langganannya, memang terasa aneh bin ajaib.

Tulisan mencoba menjawab mengapa restrukturisasi, ditolak/diterima dari perspektif perubahan sosial (*social change perspective*) dan juga dari perspektif otonomi daerah/OtDa (*regional autonomy perspective*) serta apa konsekuensi positif/negatif yang mungkin timbul dengan diterima dan ditolaknya restrukturisasi tersebut oleh warga PLN.

Perspektif Perubahan Sosial.

Bagi mereka yang mengalami restrukturisasi, apalagi yang berkaitan langsung dengan kepentingan pribadi atau kelompok di dalamnya, restrukturisasi menjadi sesuatu yang menggoncangkan sebagaimana dirasakan dalam setiap perubahan sosial. Hal ini dapat difahami, karena perubahan sosial yang di dalamnya terdapat restrukturisasi, menurut Robert Lauer (1974:3-22), mengandung paling kurang tiga mitos perubahan sosial (*the three myths of social change*) yaitu: (1) Mitos penyimpangan (*the myth of deviance*); (2) Mitos yang menimbulkan trauma (*the myth of trauma*); (3) Mitos kesatuarahannya dan hal yang difahami sebagai utopia (*the myth of unidirectionality and utopia apprehended*).

Biasanya perubahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hal yang normal. Pemikiran Comte (dalam Lauer, 1974:4) dan perspektif fungsionalisme struktural (Parsons (1971; dalam Lauer, 1974:5) memberikan perhatian besar pada keteraturan sosial (*social order*) yang diwujudkan ke dalam stabilitas. Fokus pada stabilitas menyebabkan penghindaran terhadap perubahan. Perspektif seperti ini lebih memberi perhatian terhadap struktur ketimbang proses, bahkan proses sering ditempatkan sebagai sesuatu yang dibatasi secara struktural. Hal yang berjalan terus menerus, teratur dan tidak berubah, dipandang sebagai kondisi "normal," karena itu, perubahan dipandang sebagai penyimpangan sosial (*social deviance*). Karena itu, setiap restrukturisasi, sebagai bagian dari perubahan sosial dan proses reformasi memerlukan waktu cukup lama untuk bisa diterima dan didukung. Jadi, wajar saja dan dapat dimengerti kalau restrukturisasi di tubuh PLN menuai protes dan tantangan.

Mekanisme Pertahanan Diri.

Menurut Lauer (1974: 10) perubahan sebagai sesuatu yang ada (*inherent*) dan bersifat sangat mendasar dalam kehidupan sosial harus dilihat secara realistis dan perlu didukung. Tidak ada yang tetap dalam kehidupan dan pengetahuan manusia. Segala sesuatunya bergerak, hidup, berubah, datang, pergi lalu hilang. Realitas atau yang ada tidaklah statis, maka perubahan adalah normal. Karena itu, restrukturisasi di tubuh PLN adalah juga normal, bukan suatu penyimpangan maupun merugikan.

Perubahan sebagai tidak normal (*abnormal*) dikaitkan dengan ide kedua. perubahan adalah traumatis, karenanya perubahan sering disebut sebagai "siksaan" (*ordeal*), "krisis," "agen asing, dan tidak diinginkan" (Lauer, 1974: 13). Karakter traumatis dari perubahan, menurut hemat Lauer (1974:15) mungkin didukung oleh sejumlah besar rintangan psikologis dan sosial bagi perubahan yang telah diidentifikasi. Halangan ini dapat dilihat sebagai **mekanisme pertahanan diri** terhadap trauma perubahan. Ada berbagai cara orang menolak perubahan. Setiap agen perubahan menghadapi

tidak sedikit masalah ketika ia mengajak orang lain menerima perubahan atau menuju pembaruan. Dalam beberapa kasus, sistem nilai tertentu tampaknya cenderung menolak perubahan

Restrukturisasi di tubuh PLN 2008, sebagai bagian dari perubahan, pada permulaannya mungkin menimbulkan trauma pada sebagian warga PLN. Namun trauma, yang berasal dari gejala psikologis karena kekhawatiran akan berkurangnya hak-hak atau fasilitas yang diperoleh sebelumnya, akan hilang dengan sendirinya. Waktu diperlukan untuk menghilangkan trauma dan menerima perubahan, karena restrukturisasi cenderung bermanfaat bagi para warga PLN sendiri pada masa yang mendatang.

Mitos kesatuarahannya adalah suatu ide bahwa semua masyarakat pada akhirnya menuju kearah satu tujuan khusus. Teori ini yang diperkuat dengan teori modernisasi, sebagaimana dikritik oleh Alvin So (1990:17-90), cenderung mempertentangkan tradisi vs kemodernan. Ide kesatuarahannya itu pada dasarnya merupakan satu bentuk determinisme teknologi and metodologi (*methodological and technological determinism*). Kenyataannya, tidak ada masyarakat yang sama persis dengan setiap masyarakat industri lainnya (Alvin So, 1990:53-54), dan keberhasilan Dunia Barat belum tentu dapat diikuti dan ditiru oleh negara-negara Dunia Ketiga tanpa suatu kekeliruan.

Ide kesatuarahannya (*unidirectional idea*) cenderung mengarah pada mitos utopia yang mengasumsikan suatu masyarakat industri modern akan menciptakan keberhasilan luar biasa dalam masyarakat manusia. Upaya mencapainya dan sekaligus "memecahkan" masalah kemanusiaan terletak pada upaya mendorong negara-negara sedang berkembang (NSB) untuk menjadi "moderen" --menjadi moderen atau memoderenkan di sini sama dengan membaratkan (*westernize*)-- secepat dan sehancur mungkin bagi NSB. Semakin cepat mereka dekat dengan dan menjadi Barat atau dibaratkan semakin cepat pula umat manusia "menikmati perdamaian dan kemakmuran" (Inkeless, 1964). .

Teori ketergantungan (Amin, 1976) dan sistem dunia (Wallerstein, 1984) mengkritik bahwa semakin NSB mengikuti

jalan yang diinginkan negara industri maju NIM (*westernization*), semakin cepat pula mereka tergantung dan terpinggirkan (*peripheralized*). Karenanya, "kemakmuran" dan "perdamaian" umat manusia melalui pembaratan, menurut para penganut teori modernisasi, adalah utopia.

Hubungan ide kesatuan dan utopia dengan reaksi negatif terhadap rencana restrukturisasi di tubuh PLN tampaknya berjalan sejajar. Karenanya, kontroversi sekitar ide restrukturisasi dapat dimengerti dengan melihat 2 (dua) perspektif yang saling bertolak belakang seperti diuraikan berikut: *Pertama* mencurigai restrukturisasi sebagai bagian dari perubahan sosial yang mengikuti jalan modernisasi yang ditempuh Barat. Jalan ini dicurigai sebagai penyimpangan dan menimbulkan trauma, karena ia dianggap sebagai proses pembaratan (*westernization*). Berdasarkan kekhawatiran itu, restrukturisasi pada banyak tempat, termasuk juga di tubuh PLN, diprotes para karyawan, karena ia dicurigai sebagai "rekayasa" Barat yang kapitalistis yang pada akhirnya dianggap akan "merugikan" negara.

RESTRUKTURISASI PLN DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN SOSIAL DAN OTONOMI DAERAH¹⁰

B. BAGIAN 2

Kekhawatiran berdasarkan perspektif pertama ini tidak perlu terjadi. Restrukturisasi yang diminta oleh RUPS PT. PLN 2008, sebagaimana disampaikan Direksi PT. PLN sendiri kepada seluruh karyawannya (SekPer. PT. PLN (Persero) Pusat, 2008:1) justru mengandung hal positif, sehingga proses restrukturisasi (1) perlu disikapi secara arif dan bijaksana, (2) mengedepankan kepentingan pelanggan, karyawan dan pemegang saham, termasuk negara; (3) bertujuan meningkatkan efisiensi dengan tidak mengorbankan kepentingan dan hak-hak karyawan, walau adanya perubahan fasilitas kesehatan,.

Perspektif *kedua* menyikapi perubahan sosial, termasuk restrukturisasi yang terdapat di dalamnya, secara positif, dan menerimanya tanpa ada rasa curiga sedikitpun, karena restrukturisasi merupakan hal yang normal, sesuatu yang pasti ada dalam setiap kehidupan, dan bukan suatu penyimpangan, sehingga ia tidak menimbulkan trauma. Karena itulah, restrukturisasi di tubuh PLN yang diminta oleh RUPS 2008 seharusnya ditanggapi secara positif demi peningkatan efisiensi bagi kepentingan semua pihak: pelanggan, perusahaan, pemegang saham dan negara, dan para karyawan mereka.

Perspektif Otonomi Daerah.

¹⁰ Tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran kepada para anggota Serikat Pekerja (SP) dan para peserta Seminar dan Lokakarya (SemiLoka) yang diselenggarakan oleh Panitia yang tergabung dalam SP PT.PLN (Persero) Wilayah KalBar dengan Tema Restrukturisasi PLN: "Antara Kehancuran Total dan Keberfihakan pada Masyarakat" diadakan di Auditorium UNTAN, 12 Maret 2008. Artikel ini sebagai ringkasan dari makalah penulis yang disajikan pada SemiLoka tersebut adalah bagian kedua dari dua tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan Sabtu, 15 Maret 2008, halaman 10.

Resiko yang dihadapi karena terlalu luasnya wilayah kerja PLN seperti: berkaitan dengan efisiensi; kepekaan terhadap daerah yang letaknya jauh dari Kantor Pusat; ketidakadilan dalam pelayanan kepada langganan antara daerah satu dengan lain; kesulitan dalam pengawasan, karena jenjang pengawasan (*span of control*) terlalu luas; kemungkinan timbulnya KKN, mendorong perlunya restrukturisasi berkaitan dengan pemisahan PLN menjadi dua wilayah operasional: Jawa, dan Luar Jawa. Karena itu, restrukturisasi merupakan alternatif dalam mengurangi resiko tersebut.

Pengalaman Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) yang membagi wilayah operasinya ke dalam beberapa wilayah kerja, seperti PTPN 1-4 dan 9-12 di Sumatera, PTPN 7 dan 8 di Jawa, PTPN 13 dan 14 di Kalimantan dan Sulawesi, dengan masing-masing manajemen terdesentralisasi penuh pada tiap-tiap wilayah, tampaknya telah menginspirasi para pemegang saham PLN untuk melakukan restrukturisasi seperti itu. Pembagian wilayah kerja ini telah memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak, seperti Pemerintah Pusat (PemPus), Provinsi, kabupaten [PemDa], pemerintah kecamatan dan desa, dalam bentuk berbagai jenis pajak, retribusi dan pungutan lainnya; bagi masyarakat setempat dalam hal pembukaan lapangan kerja, pengaruh sosial ekonomi yang berlipat ganda (*highly social and economic multiplier effects*); pembagian sekian persen keuntungan bersih perusahaan bagi pembangunan masyarakat atau dana PeMas (*community development funding/CDF*); penyediaan dana fasilitas kegiatan seni, olah raga, sosial, budaya dan keagamaan; penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan PusKesMas dengan dokter-dokter dan para medis, dan lain sebagainya.

Restrukturisasi, OtDa dan NKRI.

Kemanfaatan besar yang telah diberikan oleh PTPN tersebut di atas diharapkan mampu pula diberikan oleh PT. PLN kepada pihak-pihak terkait, terutama para pelanggan, PemDa, masyarakat di wilayah kerja PLN ini. Mereka sangat berhak mendapatkan manfaat dari PLN yang beroperasi di

daerah mereka. Itulah yang harus terjadi pada OtDa dalam naungan NKRI, seandainya PT. PLN (persero) ingin lebih berjaya. Pertanyaan yang sering timbul dalam masyarakat KalBar adalah dapatkan peluang dan manfaat seperti yang mereka telah terima dari PTPN disediakan dan diberikan oleh PLN kepada mereka? Jawabannya adalah tentu saja mungkin, seandainya perusahaan ini memiliki manajemen kerja terpisah dari PLN Pusat atau di Jawa, sehingga PLN di Luar Jawa lebih leluasa berorientasi ke wilayah dimana ia berada. Kemajuan PLN melalui manajemen yang terdesentralisasi kuat tidak hanya realisasi dari dan mendukung OtDa yang kuat, tetapi juga akan memperkuat NKRI dan partisipasi rakyat di daerah, yang akhirnya akan memperkuat NKRI dan PLN sendiri, termasuk tentu kepentingan karyawannya..

Kepentingan pelanggan, karyawan, masyarakat dan PemDa dengan adanya perusahaan dalam semangat OtDa di daerah mereka dimana PLN beroperasi, akan lebih menjamin kelanggengan (*continuity*) PLN dan OtDa. OtDa sebenarnya merupakan peluang yang sukar dicari tandingannya bagi rakyat di daerah untuk meningkatkan kepentingan sosial, budaya, ekonomi dan politik mereka. Akan tetapi peluang emas ini belum juga dapat terealisasikan, karena kedua undang-undang (UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999) masih mengandung kelemahan-kelemahan. Pengganti UU No. 22/1999 yaitu UU No.32/2004, belum juga dapat menghilangkan distorsi itu (Alqadrie, 2005:16-33). Kelemahan dan distorsi yang terkandung di dalam UU tersebut melahirkan perbedaan filosofis dasar mengenai OtDa itu sendiri. Perbedaan filosofis itu, menurut hemat Syamsuddin Haris (2001:10-13), menimbulkan paling tidak 2 (dua) cara pandang alternatif terhadap OtDa, yaitu: *Pertama*, OtDa merupakan otonomi masyarakat daerah dan bukan sekedar otonomi PemDa; *Kedua*, OtDa merupakan hak daerah yang sudah ada secara tradisional pada masyarakat setempat, dan bukan hal baru yang merupakan belas kasihan Pusat dan kewajiban daerah.

Restrukturisasi, OtDa dan Kesejahteraan Masyarakat.

Cara pandang pertama membawa konsekuensi logis bahwa OtDa seharusnya ditujukan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat, bukan untuk dinikmati oleh Pemda dengan semua jajarannya dan DPRD. Selain itu, PemPus, Pemda (PemProv., dan PemKab dan PemKot), para elit politi, pemuka/tokoh masyarakat dan kelompok etnis serta golongan, hendaknya dapat menerima, menghargai dan menghormati keanekaragaman budaya atau adat istiadat dari kelompok etnis atau golongan lainnya. Konsekuensi dari cara pandang kedua adalah bahwa OtDa sebagai hak tradisional masyarakat tidak dapat dicabut oleh PemPus, dan kewenangannya *hanya terbatas* pada penyerahan dan pengaturan wewenang yang sudah ada di daerah melalui kebijakan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari perspektif OtDa seperti diuraikan di atas, restrukturisasi berkaitan dengan pembagian kerja PLN: Jawa dan Luar Jawa, termasuk KalBar, merupakan sesuatu yang dituntut oleh OtDa setelah era reformasi, dan restrukturisasi seperti ini merupakan konsekuensi logis dari cara pandang pertama, yaitu PLN yang telah direstrukturisasi dengan memiliki 2 (dua) wilayah kerja terpisah akan lebih memungkinkannya meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga restrukturisasi yang dijiwai oleh OtDa akan menjamin kuatnya dan langgengnya NKRI.

Pertimbangan terhadap diterimanya restrukturisasi berkaitan dengan pembagian wilayah kerja PLN --Jawa dan Luar Jawa-- lebih berhubungan dengan pertimbangan ekonomi politik (*political economic considerations*). Selanjutnya, kepentingan yang menyangkut pertimbangan sosial ekonomi (*socioeconomic considerations*) lebih berhubungan dengan efisiensi dan sumbangan PLN bagi pembangunan daerah bagi kawasan luar Jawa dalam rangka pembangunan nasional.

Selama ini, bukan rahasia umum lagi bahwa sumbangan PLN bagi daerah-daerah dalam wilayah dimana perusahaan ini beroperasi sangat kurang. Ada kesan bahwa "terang" dan "bersinarnya" PLN yang notabene berasal dari sumbangan wilayah-wilayah daerah luar Jawa selama ini, tampaknya

hanya menyumbang bagi daerah-daerah Jawa dan Jakarta, khususnya, seperti diberitakan oleh sejumlah surat kabar (Kompas, 18/2-2008:4) menjadi pundi-pundi bagi pejabat Pusat.

Berkaitan dengan restrukturisasi PLN yang membagi wilayah kerjanya menjadi dua, Jawa dan Luar Jawa, seiringan pula dengan OtDa dalam mana wewenang urusan pemerintahan telah dibagi antara Pusat dan daerah, saya menyarankan agar dibuat kebijakan baru yang dituangkan ke dalam struktur yang menggambarkan mekanisme hubungan PLN wilayah --atau apapun namanya-- dengan PemProv dan PemKab/PemKot dimana perusahaan ini beroperasi yang menyangkut koordinasi, persetujuan terhadap pengangkatan pimpinan PLN wilayah, evaluasi kerja PLN terutama berkaitan dengan pelayanan terhadap pelanggan. Mekanisme baru semacam ini diharapkan dapat menambah kedekatan PT. PLN (Persero) dengan PemDa yang selama ini keduanya hampir tidak ada hubungan satu dengan lainnya.

BAB XLII

*PEMILIHAN REKTOR DAN MASA DEPAN UNTAN*¹¹

Wacana pemilihan Rektor UNTAN masa jabatan 2007 – 2011 sedang bergulir. Beberapa bakal calon (Balon) Rektor – mungkin juga lengkap dengan pasangan mereka masing-masing -- bakal calon Pembantu Rektor (Balon Purek) -- telah mulai dielus-elus. Ini merupakan hal biasa dan tidak mengejutkan dalam alam demokrasi. Akan tetapi, sesuatu yang mengejutkan adalah Rektor sekarang, Prof. Asniar Ismail, SE. MM. (AI), tidak bersedia dicalonkan lagi.

Bersedia atau tidak seorang pemimpin dicalonkan kembali pada masa jabatan kedua adalah hak demokrasinya, yang harus diterima dan dihormati, sehingga tidak perlu menimbulkan berbagai spekulasi. Inilah salah satu unsur konkrit dari karakter masyarakat **multikultural** yang sudah ada sejak masyarakat Madani yang perlu dihidupkembangkan kembali dalam dunia akademis. Akan tetapi, menurut saya pribadi, sayang sekali AI tidak menggunakan haknya pada kesempatan kedua nanti.

Masa Bakti Rektor dan Daya Saing Universitas.

Seorang pemimpin Perguruan Tinggi (PT) belum dapat berbuat banyak dalam masa jabatan pertamanya. Ia masih perlu belajar, berkonsolidasi, menjalin kerjasama dan kemitraan ke dalam dan ke luar, menyesuaikan program umum yang telah disusun, dan sebagainya. Ia juga mulai menggeluti hal-hal rutin, membenahi administrasi dan manajemen ke dalam, dan membangun taraf awal dari program fisik yang telah dipersiapkannya.

¹¹ Artikel ini sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam menghadapi Pemilihan Raktor dan bagi masa depan UNTAN telah pernah dimuat pada Kolom Opini dalam *Harian Pontianak Post* terbitan Selasa, 20 Juni 2006, halaman 21.

Pada masa kedua ia baru dapat menjalankan roda kepemimpinannya dengan kecepatan penuh dalam merealisasikan program jangka menengah dan panjang, meneruskan pembenaan ke dalam dan hal-hal rutin, dan melaksanakan hal-hal yang insidental, membina dan menghidupkan hal-hal yang menyangkut dunia akademis pada umumnya dan kehidupan atau suasana kampus yang kondusif pada khususnya, meneruskan program fisik, dan membangun kemitraan dengan pihak luar universitas baik dengan dunia non akademis seperti dunia usaha dan pemerintah maupun dengan dunia akademis dalam dan luar negeri.

Persaingan dalam meningkatkan mutu, daya saing dan harga diri universitas dan daerah tidak dapat diperoleh hanya melalui persaingan dengan lingkungan sendiri, tetapi ia harus diorientasikan ke luar secara nasional, regional dan, kalau mungkin, internasional. Dengan demikian, keunggulan dan kemampuan bersaing para dosen, mahasiswa dan lulusan akan meningkat dan memperoleh penghargaan, termasuk kemudahan memperoleh lapangan kerja dan kesempatan besar lainnya, dalam lingkungan yang lebih luas – di tingkat nasional, regional dan internasional.

Prestasi Rektor dan Andaikata Tampil Kembali.

Terlepas dari kekurangannya sebagai seorang manusia, banyak pengamat netral percaya bahwa selama masa jabatan pertamanya sampai akhir tahun ini AI telah banyak melakukan hal-hal positif, seperti beberapa program yang seharusnya dirintis dan dilaksanakan pada masa jabatan pertama dan kedua telah ia laksanakan pada masa jabatan pertamanya, seperti antara lain misalnya pendirian Fakultas Kedokteran (FKUNTAN), pembenaan ke dalam dan merintis kerjasama ke dalam dan ke luar.

FKUNTAN telah memulai perkuliahannya setahun yang lalu, namun mengenai gedungnya, yang seharusnya akan dibangun pada masa jabatan kedua Rektor, tiang pertamanya telah diresmikan bulan Mei, dan akan dibangun Agustus atau September tahun ini. Akta Mengajar II, yang seharusnya dimiliki dan diperlukan oleh alumni D2 FKIP sebagai

persyaratan menjadi guru PNS, dapat diselesaikan oleh AI sehingga tidak menghambat mereka untuk menjadi PNS, walaupun masalah itu belum terselesaikan pada masa jabatan Rektor sebelumnya. Kerjasama UNTAN dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota, dan instansi lainnya bertambah meningkat, serta banyak lagi hasil positif lainnya. Walaupun usaha meningkatkan suasana akademis, kualitas dosen dan alumni, dan daya saing UNTAN telah dan sedang dirintis, upaya-upaya itu tentu masih harus ditingkatkan oleh penggantinya, termasuk meningkatkan kualitas dan daya saing nasional, regional dan global.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan beberapa keberhasilan AI pada masa jabatan pertamanya yang dapat menjadi modal untuk tampil dalam pencalonan keduanya. Bisakah AI memenangkan kompetisi merebut jabatan Rektor bila ia tampil pada masa kedua ini? Saya kira bisa. Dengan menggunakan isu jender dalam mana sekitar 30% dari jumlah seluruh dosen UNTAN adalah wanita, ditambah dengan pendukung rasional atau setianya, dan kekuatan-kekuatan di Fakultasnya -- Fakultas Ekonomi UNTAN -- yang berjumlah sekitar 100 orang, AI boleh jadi akan muncul sebagai tiga besar di tingkat dosen. Dengan prestasinya pada masa jabatan pertamanya, bukan mustahil AI akan terpilih kembali di tingkat Senat UNTAN sebagai Rektor masa bakti kedua. Akan tetapi, itulah demokrasi. Kita harus menerima dan menghargai keinginan AI untuk tidak mencalonkan lagi.

Selain menghargai pendapatnya, kita seharusnya juga mendengarkan keinginan AI yang disampaikan di Harian Pontianak Post (13/4-2006) bahwa ia tidak mencalonkan lagi pada masa jabatan kedua, karena ia ingin ada orang lain menggantikannya yang memiliki kelebihan dalam berbagai bidang agar dapat melanjutkan tugasnya membangun UNTAN. Akan tetapi, saya percaya AI akan tetap sepenuhnya netral dalam proses pemilihan penggantinya. Pada umumnya pejabat lama sebagai pribadi tidak akan pernah dapat bertindak obyektif dalam melihat secara jernih sebagian besar pribadi penggantinya seperti antara lain kualifikasi, kelebihan, tingkat kemampuan akademis dan manajemen dan lobi, bagi kepentingan lembaga dan daerah. Menghilangkan

rasa *like* dan *dislike* dan unsur subyektif lainnya tidak saja akan memperoleh pengganti yang memiliki kemampuan bersaing secara global dan syarat lain yang dibutuhkan oleh dunia akademis yang penuh dengan tantangan, tetapi juga akan menghindari penilaian sangat negatif dari *civitas academica*.

Calon Pengganti.

Kepemimpinan adalah suatu proses berkesinambungan tiada henti. Program yang belum sempat terselesaikan oleh pemimpin sekarang hendaknya dilanjutkan oleh penggantinya dengan lebih berhasil lagi. Keberhasilan pemimpin justru terletak apakah ia dapat menciptakan pemimpin baru penggantinya yang lebih baik lagi.

Kalau kita mau menghargai hak AI untuk tidak mencalonkan lagi, kita juga seharusnya mau melaksanakan apa yang ia inginkan agar penggantinya memiliki kelebihan dalam hal: (1) **Wawasan dan Orientasi Kedepan**. Wawasan berkaitan dengan cara pandang, paradigma dan pemahaman seseorang dalam tugas kepemimpinannya. Si calon pengganti hendaknya memiliki cara pandang yang luas dan paradigma baru dalam dunia akademis dan dunia sosial yang penuh tantangan, dan pemahaman terhadap ilmu dan teknologi yang berkembang cepat. Ini mengharuskan si calon tidak terkungkung pada lingkup daerah ini saja, tetapi mampu membawa UNTAN tidak hanya dalam persaingan dengan PT di Kalbar saja, tetapi juga dengan PT bermutu di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Asia, bahkan PT di dunia. Ini berkaitan erat dengan kemampuan pemimpin yang lebih berorientasi pada masa depan jangka panjang dan pada tantangan dan kemajuan global. (2) **Komitmen**. Komitmen seseorang pemimpin akan menciptakan dan memperkuat kemampuan atau kualitas, wawasan dan orientasi pada kelembagaan dan daerah bahkan bangsa dimana ia berada. Komitmen juga adalah keberanian, kemampuan dan kemauan seseorang melepaskan dirinya hanya pada orientasi menciptakan loyalitas, memelihara kepentingan dan menguntungkan lingkungan sendiri yang berbau politis – kelompok, beberapa pendukung yang punya kepentingan

sempit, lingkaran avonturir, keluarga dan pribadi sempit. (3) **Kualitas dan kemampuan.** Keduanya berkaitan dengan tingkat pendidikan (*educational level*) dan wawasan ke depan, tapi tidak dengan latar belakang bidang studi/spesialisasi yang dimiliki, tetapi lebih berhubungan dengan jenjang pendidikan formal yang diperlukan sekarang ini.

Kualifikasi Pendidikan.

Oleh karena itu, apakah tidak mungkin pengganti rektor juga memiliki pendidikan formal minimal sama dengan beliau? Tingkat pendidikan mempengaruhi prestasi, penampilan, kematangan, ketajaman analisis, dan wibawa atau prestise universitas, termasuk kemampuan berkomunikasi dan lobi dalam semua tingkat, nasional, regional dan internasional.

Hal seperti itu merupakan penjabaran dari pesan yang disampaikan secara implisit oleh AI ketika ia tidak bersedia dicalonkan lagi, dan itu juga didambakan oleh banyak kalangan antara lain Dr. Leo Sutrisno, Dr. Ismail Yusuf, Dr. Fariastuti, dan Dr. Rif'at Hamdy (dalam Pontianak Post, 14;15;17-18/4; 8-9/5-2006:14,22) yang mendukung keinginan Rektor agar UNTAN lebih maju lagi dan mengarah pada keunggulan danmeningkatkan persaingan nasional dan global. Semoga.

BAB XLIII

DIALOG BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DENGAN PARA BALON REKTOR: EMPAT HAL POKOK YANG DIPERTANYAKAN DAN DIHADAPI UNTAN¹²

A. BAGIAN 1

Salut dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNTAN yang mengambil inisiatif mengadakan dialog antara 7 (tujuh) Bakal Calon Rektor (BALREK) dengan para mahasiswa. Dialog yang diadakan pada Selasa, 17 Oktober 2006 merupakan salah satu bentuk kepedulian dan partisipasi mereka terhadap almamater dan BALREK mereka yang akan segera dipilih untuk memimpin UNTAN.

Para mahasiswa seharusnya tahu siapa, bagaimana dan mengapa BALREK ini atau itu akan dipilih nanti. Itulah motivasi utama dialog tersebut, sehingga Pemilihan Rektor tidak lagi seperti memilih kucing dalam karung. Keinginan mereka untuk secara langsung mengetahui keseriusan, kualifikasi dan tingkat intelektualitas, integritas, wawasan dan kesadaran ilmiah dan berdemokratis, dan jaringan hubungan dengan universitas dan instansi dalam dan luar negeri yang dimiliki BALREK, perlu dihargai, karena para mahasiswa terlibat langsung dalam proses pendidikan dan kehidupan di UNTAN.

¹² Isi tulisan ini merupakan hasil dialog Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dengan para Bakal Calon (BaLon) Rektor UNTAN Pontianak dan sumbangan pemikiran penulis bagi para BaLon dalam menghadapi pemilihan Rektor bagi masa depan UNTAN. Artikel ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan, *Sabtu, 56 November 2006*, halaman 11.

Empat pertanyaan mahasiswa yang sangat mendasar akan diuraikan disini: Apakah 7 (tujuh) BALREK yang akan tampil pada 15 dan 22 November 2006 itu serius? Mengapa nilai jual lulusan UNTAN rendah dan kurang unggul dalam pasaran kerja? Bagaimana menciptakan suasana kampus yang kondusif, termasuk lingkungan yang bersih? Bagaimana mengatasi kurangnya dana dalam mendorong proses belajar mengajar yang bermutu dan kreativitas unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang efektif?

Seriuskah para BALON Rektor?

Dalam menjawab pertanyaan ini, semua BALREK tampaknya sangat serius mengikuti proses pencalonan sampai terpilih menjadi rektor. Alasan keseriusan ini dapat dicermati berdasarkan fakta bahwa ketujuh BALREK ini telah melalui proses pematangan dengan pernah menduduki jabatan dan tugas fungsional, struktural dan pembantuan di dalam dan di luar kampus. Ada beberapa diantara mereka sebagai mantan Dekan dan sedang menduduki jabatan pada saat ini sebagai Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga di UNTAN, pernah dan sedang menjadi penasihat atau konsultan pada instansi dan perusahaan pemerintah dan swasta, seperti PTPN XII dan BUMN lainnya, Badan Pemeriksa (BP) pada PDAM Kota Pontianak adapula yang sedang menjadi penasihat hukum perusahaan pemerintah dan swasta yang cukup bonafid. Ada pula yang pernah menjadi anggota DPR/MPR RI, Ketua organisasi sosial budaya, Ketua organisasi alumni dari organisasi mahasiswa Islam. Ada pula diantara mereka yang memegang jabatan fungsional di dalam dan di luar negeri yang cukup lama, seperti pernah menjadi guru dari SD, SLTP dan SLTA, asisten dosen, dan sekarang menjadi Guru Besar, dosen tamu, *visiting professor* dan *visiting researcher* di dua negara Eropah Barat, koordinator dan ketua Jaringan Studi Konflik Indonesia berkedudukan di salah satu negara Eropah Barat, maupun penceramah kondang dan peserta aktif pada pertemuan ilmiah di beberapa universitas atau pusat studi dalam dan luar negeri. Selain itu mereka juga telah sibuk dengan urusan rutin seperti mengajar dan membimbing mahasiswa, tugas

insidental dalam bidang akademis seperti menulis, berdiskusi dan ceramah, telah sibuk pula berpergian dengan tugas sebagai penceramah, peneliti, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Dalam kedudukan, pengalaman luas seperti itu, tanpa menjadi Rektor sekalipun, ketujuh BALREK ini sepertinya telah sederajat dengan karir Rektor: berpergian kesana kemari ke dalam dan ke luar negeri. Dengan menjadi Rektor kelak mereka harus mengurangi kesibukan dan tugas-tugas tersebut sekaligus mengurangi pula kebebasan dan hari-hari tanpa ikatan dan ketegangan (*without enjoyment and pressure*) maupun penghasilan tambahan dibanding kalau mereka menjadi Rektor.

Pertimbangan seperti ini telah difikirkan masak-masak dan diputuskan oleh ketujuh BALREK tersebut sebagai suatu bentuk keputusan sangat serius yang sulit untuk diragukan. Mereka hanya ingin memiliki posisi sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) sehingga mereka dapat secara langsung mengambil dan melaksanakan keputusan untuk membangun UNTAN kedepan antara lain dengan meningkatkan kualitas dan daya saing UNTAN ditingkat nasional, regional dan global.

Hal sama adalah sebagaimana pernah saya lakukan ketika menjadi Dekan FISIP dua periode 1995-98/1998-2001, berkat kerjasama dan dukungan dari setiap unsur di UNTAN, FISIP mampu membangun tujuh buah Program D3 dan sebuah Program Ekstensi Ilmu Sosial dengan dua jurusan, sebuah Program Magister Ilmu Sosial dengan tiga program studi: Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional beserta masing-masing perpustakaan dengan fasilitasnya.

Inilah obsesi saya menjadi BALREK untuk melanjutkan usaha yang telah dirintis Rektor sebelumnya. Saya ingin mengejar ketertinggalan UNTAN dari dan meningkatkan kualitas dan daya saing UNTAN berdasarkan paling tidak standar universitas-universitas bergengsi di Jawa, dan kedepan dengan standar universitas-universitas di ASEAN.

Nilai Jual Lulusan UNTAN.

Ada kesan dari masyarakat Kalbar bahwa nilai jual lulusan (*output*) UNTAN masih rendah. Alumni UNTAN rata-rata hampir dari setiap fakultas kalah bersaing dalam memperebutkan lapangan kerja yang ada di Kalbar. Kalau keluhan ini mengarah pada usaha memperebutkan lapangan kerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), kesan nilai jual *output* UNTAN rendah dapat diterima. Rendahnya nilai jual *output* UNTAN pada sub sektor kepegawainegerian berkaitan dengan persaingan terbuka dalam lapangan kerja. Akan tetapi lapangan kerja bukan saja terletak pada jalur kepegawainegerian, tetapi juga pada sektor swasta dan pekerjaan mandiri.

Untuk mengisi atau membuka lapangan kerja pada sektor yang disebut kedua ini, sudah waktunya Rektor periode 2007-2011 mendatang mempersiapkan para mahasiswa dalam setiap jurusan/program studi di UNTAN dengan mata kuliah kewiraswastaan (*enterpreneurship*) tidak saja sebagai ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan tetapi juga sebagai proses perubahan dari paradigma dan sikap lama mahasiswa yang lebih menekankan PNS dan lapangan kerja dengan *blue collar and tie* sebagai satu-satu pilihan pekerjaan, kearah kesadaran, paradigma baru dan sikap positif yang lebih menghargai pekerjaan praktis mandiri dengan "menyingsing baju dan menggunakan celana pendek."

Membuka restoran, rumah makan, dan penginapan atau rumah kos; segala macam perbengkelan atau perawatan/perbaikan (*service*) kendaraan roda dua dan empat, radio, TV, lemari es, komputer dan lain-lain; bermacam jenis toko, kedai atau gerai dan tempat penjualan kerajinan tangan; tempat penitipan bayi dan anak-anak, tempat bermain anak-anak (*play group*), sekolah taman kanak (STK), tempat penjual bunga dan souvenir, dan lain sebagai, merupakan lapangan kerja tidak pernah habis-habisnya dan memiliki prospek cerah. Khususnya lapangan kerja sub sektor penulisan, seperti di majalah, surat kabar, jurnal, buku dan media cetak dan audiovisio lainnya, sangat menjanjikan. Tulisan atau artikel yang dimuat di koran dan majalah di Jakarta dihargai minimal Rp. 750.000,- sekali muat. Rektor baru hendaknya juga dapat menggalakkan para

mahasiswanya agar mampu menjadi komunikator handal:
berkomunikasi melalui lisan dan tulisan baik dengan bahasa
Indonesia maupun dengan bahasa asing.

DIALOG BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) DENGAN BALON-BALON REKTOR: EMPAT HAL POKOK YANG DIPERTANYAKAN DAN DIHADAPI UNTAN¹³

B. BAGIAN 2

Ada tiga fakta social yang harus dihadapi perguruan tinggi (PT) dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai jual para lulusannya: (1) Persaingan memperoleh lapangan kerja baru diikuti tidak hanya oleh para lulusan UNTAN, tetapi juga oleh alumni PT di dalam dan luar Kalbar, khususnya dari PT bergengsi di Jawa. Untuk memenangkan persaingan ini, Rektor mendatang hendaknya mampu meningkatkan daya saing para lulusan UNTAN dengan meningkat kualitas yang standarnya minimal mendekati standar PT Asean. (2) Penerimaan PNS dan karyawan lainnya di Kalbar disinyalir masih didasarkan oleh pertimbangan subyektif berupa pesanan dari oknum-oknum pejabat. Karena itu, Rektor UNTAN kedepan, dengan pengaruh dan jaringan kuatnya dengan Pemprov, Pemkab/Pemkot dan berbagai perusahaan di Kalbar, hendaknya mampu memberi andil bagi perbaikan sistem tersebut, dan juga dapat meyakinkan mereka bahwa para lulusan UNTAN secara obyektif mampu/pantas mengisi baik lowongan maupun jabatan yang diperlukan. Hanya Rektor yang memiliki pengaruh luas, kemampuan menjadi penjamin (*recomendator*) dan sekaligus mampu menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar yang berstandar regional dan internasional, akan dapat meningkatkan nilai jual *outputnya*. (3) Untuk mencapai kualitas pendidikan

¹³ Isi tulisan ini merupakan hasil dialog Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dengan para Bakal Calon (BaLon) Rektor UNTAN Pontianak dan sumbangan pemikiran penulis bagi para BaLon dalam menghadapi pemilihan Rektor bagi masa depan UNTAN. Artikel ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan dan telah pernah dimuat pada Kolom Interaktif dalam *Harian Equator* terbitan, *Senin, 6 November 2006*, halaman 11.

berstandar ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, Rektor mendatang hendaknya mampu memadukan dua sistem yang dipraktekkan pada *English-Speaking Universities*: (a) Sistem Pengubahan dari Masukan ke Keluaran/SPMK (*Input Conversion Output System/ICOS*) dan (b) Sistem Manajemen Mutu Terpadu/SMMT (*Total Quality Management System/TQMS*).

Pada SPMK, keluaran (*output*) ditentukan oleh masukan dari luar (*external input*), berupa para calon mahasiswa yang berasal dari SLTA dan kondisi sosial, budaya dan ekonomi mereka, dan oleh masukan dari dalam (*internal input*), seperti para dosen, karyawan, fasilitas, dan lingkungan kampus. Kedua masukan tersebut diolah di dalam proses perubahan dengan memperhatikan dan menggunakan sistem dan standar pendidikan pada level minimal standar nasional, tetapi kedepan lebih berorientasi pada standar ASEAN, Asia atau internasional. Pada SMMT, pengelolaan universitas dianalogikan seperti sebuah bisnis hotel atau restoran yang memberikan pelayanan prima kepada para langganannya: bersih, aman, unggul, bersaing, punya daya tarik, enak, dan suasana santai dan romantis. Sehingga masyarakat akan menjadi pelanggan setia.

Oleh karena itu, hanya Rektor yang berkualifikasi dan berwawasan internasional, memiliki kerjasama, jaringan dan lobi konstruktif dengan Pemda dan tokoh masyarakat, akan berhasil memperoleh *input* yang berkualitas untuk menghasilkan *output* bermutu dan nilai jual tinggi. Selain itu, hanya Rektor yang mampu bertindak selaku Direktur atau Manager profesional dan demokratis yang dapat mengarahkan (*direct*), mengelola (*manage*) masukan interen dan eksteren serta secara konsekuen dan konsisten menerapkan standar dan sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu, wawasan ke depan dan kepuasan pelanggan (mahasiswa, orangtua, masyarakat dan dunia usaha), akan berhasil menciptakan *output* yang berdaya saing tinggi.

Kebersihan Kampus.

Ketidakteraturan kampus merupakan faktor penghambat terciptanya suasana akademis yang kondusif. Ada dua faktor

yang mempengaruhi kebersihan kampus: (1) faktor dalam (*internal factors*) dan (2) faktor luar (*external factors*). Faktor dalam berkaitan dengan kebiasaan dan sikap warga kampus (*civitas academica*) seperti para mahasiswa, karyawan dan dosen termasuk keluarga mereka sejak dari lingkungan rumah tangga, keluarga, sekolah dan masyarakat dari mana mereka berasal. Faktor luar berkaitan dengan ketidakteraturan yang tidak berasal dari *civitas academica*.

Berkenaan dengan mahasiswa dan dosen, Rektor ke depan perlu memikirkan agar ujian masuk perguruan tinggi (UMPT) dan Ujian Masuk Dosen dan Karyawan berkaitan tidak saja dengan nilai akademis dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan nilai estetika, kebersihan, mentalitas, moralitas dan disiplin. Untuk memperoleh nilai seperti ini, kerjasama dengan masyarakat, khususnya orang tua dan kepala sekolah, dari mana mereka berasal, perlu dilakukan oleh Rektor ke depan, sehingga UNTAN memiliki dokumen lengkap tentang latarbelakang *civitas academica* dalam rangka pembinaan mereka. Akan tetapi, para mahasiswa sebagai insan yang mulai dewasa dan para dosen yang bertanggung jawab terhadap pembinaa mahasiswa dan keluarga mereka perlu segera merubah kebiasaan, sikap dan mentalitas sehingga ketertiban dan kebersihan kampus akan terpelihara.

Kesan bahwa mahasiswa "senang" melanggar peraturan kampus disebabkan oleh tidak jelasnya peraturan dan tidak tegasnya sanksi akademis terhadap pelanggar peraturan, juga oleh fakta bahwa mereka cenderung meniru pelanggaran yang dilakukan oleh para karyawan dan dosen. Hanya Rektor yang berani menerapkan sanksi (*punishment*) dan ganjaran (*reward*) terhadap mereka yang melanggar atau mematuhi peraturan kampus, akan mampu menciptakan suasana kampus yang kondusif.

Kurangnya Dana.

Kurangnya dana untuk mendukung kegiatan akademis dan kegiatan pada unit-unit kegiatan mahasiswa (UKM) dapat menyulitkan terciptanya suasana kampus yang kondusif yaitu lahirnya semangat tidak saja pada proses belajar mengajar di kalangan mahasiswa dan dosen, tetapi juga pada kondisi yang

dapat meningkatkan kesibukan mahasiswa dalam kegiatan kurikuler maupun non kulikuler. Untuk ini diperlukan dana ekstra yang tidak kecil di luar dana konvensional yang secara rutin telah dianggarkan.

Ada dua jenis dana ekstra yang dapat memperlancar kegiatan di atas: (1) dana beku atau tidak berujud tunai; (2) dana lancar yaitu dana yang berujud tunai. Dana jenis pertama dapat diperoleh melalui beasiswa dari berbagai pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan konstruktif bagi UNTAN dan KALBAR. Ini sudah pernah diperoleh, bahkan sejak pendiriannya tahun 2000 Program Magister Ilmu Sosial memperoleh dana beasiswa dari PEMPROV, PEMKOT Pontianak, sebagian besar PEMKAB, dan beberapa tokoh masyarakat Pontianak. Beasiswa seperti ini akan diperluas lagi ke BUMN, yayasan-yayasan seperti antara lain Yayasan Bhakti Suci (YBS), Perbankan, perusahaan swasta, dan perusahaan asing, dan penggunaannya akan dimanfaatkan juga untuk UKM.

Dana jenis kedua yang diinspirasi oleh kebanyakan pesantren di Jawa, pada mana dana hanya berputar di lingkungan sendiri, dapat diperoleh dengan empat cara: (a) Menambah jumlah, mengefektifkan pemasukan dan meningkatkan kualitas kantin-kantin, gerai-gerai atau kios-kios yang sudah ada sehingga tersebar keseluruh fakultas dan penjuru kampus. (b) Membuka toko-toko atau warung-warung yang menyediakan bermacam keperluan, termasuk buku, alat-alat tulis dan olahraga, souvenir, obat atau apotek, dan keperluan sehari-hari. (c) Membuka segala jenis bengkel atau pelayanan perbaikan (*service*) kendaraan roda dua dan empat, lemari es, radio, TV, komputer., dan sebagainya. (d) Mengundang investor untuk membuka rumah makan cepat saji, seperti McDonald, *Kentucky Fright Chicken*, Ayam Mbok Berek, dan sejenisnya. Keempat jenis usaha di atas dapat dilakukan dengan kontrak bagi hasil atau pembagian persentase dari laba. Akan tetapi pola apapun yang dipakai keempat aktivitas ekonomi ini ditujukan untuk membuka lapangan kerja baru bagi para mahasiswa dan keluarga dosen/karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan kegiatan mahasiswa.

BAB XLIV

Kekerasan Antar Mahasiswa dan Akar Masalah¹⁴

Dari segi tawuran mahasiswa, Kalbar menduduki peringkat 10 besar, setelah Jakarta; Makasar, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Palembang, Yogyakarta, Lampung, Padang, dan Pontianak. Dari segi intensitas, Kalbar merebut posisi 6 besar setelah 5 kota sebelumnya sejak 12/3-2010, ketika Bengkel Seni FISIPOL (BSF) ludes dibakar oleh sejumlah mahasiswa. Seminggu berselang, sejumlah informasi masuk ke HP saya berisi 2 pertanyaan: (1) Dapatkah tawuran dimasukkan sebagai kekerasan atau masih dalam tataran konflik, mengapa? (2) Kalau tawuran dikategorikan sebagai kekerasan, bagaimana mencabut akar-akarnya?

Konflik, Kekerasan dan Bom Waktu

Jawaban pertanyaan pertama adalah bahwa tawuran yang terjadi pada 12/3-2003 tidak lagi disebut konflik, karena konflik, menurut Simon Fisher (2000) berkaitan dengan perbedaan atau ketidaksesuaian pendapat antara dua orang/kelompok atau lebih mengenai satu hal/isu. Adalah benar bahwa tawuran dimulai dengan perbedaan pendapat (conflict). Namun, pada kasus tersebut, para mahasiswa tidak dapat, tidak mampu, tidak mau dan tidak berhasil mengelola dan menyelesaikan perbedaan antar mereka yang terjadi sebelumnya dengan menghargai perbedaan. Konsekuensinya adalah pengrusakan berbalas pembakaran tidak terhindarkan. Karena itu, tawuran pada saat itu sudah dapat dikategorikan sebagai kekerasan dan kebrutalan di Kampus.

Sampai hari ini pihak kepolisian sudah memeriksa 8 mahasiswa tersangka (Pontianak Post, 18/3:1). Andaikata para pelaku pengrusakan tidak ditangkap dan diadili, sama juga artinya dengan menyimpan bom waktu yang setiap saat akan meledak lebih dahsyat lagi.

Akar kekerasan dan Tiga Dimensi Kekerasan

Pertanyaan kedua, bagaimana mencegah dan mencabut akar-akar kekerasan Kampus? Rangkaian tawuran dari pengrusakan ke pembakaran merupakan kekerasan tersembunyi (latent). Upaya membongkar akar kekerasan Kampus tampaknya mengalami jalan panjang. Setelah 8 mahasiswa berhasil ditetapkan sebagai tersangka, apakah kekerasan itu akan selesai tuntas, dan tidak akan terjadi lagi? Saya kira tidak. Dalam upaya menemukan akar kekerasan, Model Tiga Dimensi Kekerasan Simon Fisher (2000) dapat digunakan. Berdasarkan model ini, ada tiga dimensi kekerasan: (1) tampak dan (2) tidak tampak yang meliputi sumber kekerasan terdiri dari sikap, perasaan dan nilai, serta (3) kekerasan struktural.

Pengrusakan dan pembakaran dalam tawuran adalah kekerasan tampak, yang diatasi sementara dengan tindakan petugas keamanan. Tindakan tersebut tidak menjamin proses kekerasan pada gelombang berikutnya dapat diselesaikan tuntas. Untuk itu, intervensi dalam membongkar akar-akar kekerasan pada dimensi kedua dan ketiga sangat diperlukan dan dilakukan secara bersamaan.

Sumber kekerasan latent pada sekelompok mahasiswa tampaknya hanya dapat dibongkar melalui peningkatan metode, pendekatan dan teknis dalam proses belajar-mengajar.

¹⁴ Artikel ini dimuat dalam *Harian Pontianak Post*, terbitan Senin, 29 Maret 2010, pada Ruang Opini, halaman 15.

Kekerasan mahasiswa yang timbul dari kondisi struktural tampaknya hanya dapat dihilangkan dengan perbaikan kebijakan PT dalam proses belajar mahasiswa. Dalam upaya membongkar kekerasan mahasiswa, kita, sebagai dosen, tidak saja telah melakukan penafsiran mendalam terhadap tawuran, tetapi juga telah mengawasi diri sendiri secara jujur terhadap apa yang kita telah perbuat dalam mencegah kekerasan. Ini berarti kita telah bertindak adil dengan tidak melemparkan kesalahan hanya kepada mahasiswa. Sayangnya, hal prinsip di atas belum sepenuhnya kita lakukan, tidak mampu kita adakan, bahkan yang pernah ada ditiadakan. Dengan begitu, kita menghadapi kesulitan untuk menghilangkan sumber kekerasan pada dimensi kedua: sikap, perasaan dan nilai-nilai kekerasan dalam diri mahasiswa.

Reward dan Punishment

Sebagai akar masalah pertama, beban tugas mahasiswa berkaitan dengan proses belajar-mengajar, sangat kurang. Seandainya setiap dosen memberi tugas berbentuk mereview buku terdiri dari abstrak, ringkasan dan komentar per semester berjumlah 6 buah (masing-masing 3 buku/bab sebelum dan setelah ujian mid semester), maka mahasiswa akan memiliki beban tugas rata-rata 36 – 48 buah (6-8 x 6) pekerjaan dalam setiap semester. Beban tugas sebanyak ini di luar tugas-tugas lainnya tidak akan menyisakan waktu luang bagi mereka untuk bersantai sepanjang malam kecuali malam Minggu. Koreksi dan pengembalian tugas yang telah dikoreksi kepada mahasiswa dalam setiap 3 – 7 hari sekali, akan menyempurnakan tugas itu..

Mahasiswa yang mengerjakan tugas dengan jujur dan mengumpulkan tepat waktu memperoleh ganjaran (reward) setimpal dan mereka yang tidak menyerahkan pekerjaan serta melakukan ketidakjujuran akan diberi sanksi (punishment). Keseimbangan reward dan punishment akan mengurangi sumber kekerasan: sikap dengan tidak berleha-leha, jujur dan bertanggung jawab; perasaan hilangnya iri dengki, kecewa dan masakbodoh; dan pudarnya nilai-nilai kekerasan (pemaksaan kehendak, dan sebagainya).

Sebagian dosen telah memberi tugas, namun persentase melakukannya, mengoreksi dan mengembalikan pekerjaan itu kepada mahasiswa perlu ditingkatkan? Cara seperti ini merupakan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Karakter (KBKt) dan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBKp). Namun, banyak pihak meragukan bahwa karakter, mental dan moral dapat diajarkan dan diatasi dalam mata kuliah. Walaupun ada KBKt dan KBKp, mereka hendaknya dimulai dan diikuti dengan dua pendekatan di atas: deeply interpretative dan honestly introspective oleh pejabat, dosen, mahasiswa dan pihak terkait dalam membongkar kekerasan di kampus.

Kegersangan Hubungan dan DO

Faktor akar masalah kedua adalah kurang adanya sentuhan perhatian, kepedulian dan kelembutan di lingkungan fakultas dari orang yang “mau dituakan” atau “bersedia menuakan” diri di depan para mahasiswa sebagai sahabat, “adik,” dan “anak,” yang sangat didambakan oleh setiap generasi muda dalam menuntut ilmu. Kegersangan, kekosongan, kesenjangan, kekakuan dan keterasingan hubungan antara “orang tua” dengan “adik/anak” di dalam kampus yang tidak mengandung academic atmosphere akan membosankan seperti berada di dalam “kurungan besi.” Kondisi seperti itu dapat mengubah orientasi mereka dari kondisi kemanusiaan dan socialitas (*humane and societal nature*) ke kondisi “teknokratis,” “rasionalitis” dan “robotis” sehingga segalanya dianggap benda mati dan didasarkan pada keuntungan materi.

Faktor akar masalah ketiga berkaitan dengan pemberhentian kuliah di tengah jalan (/DO).

Pengamatan menunjukkan ada hubungan antara mahasiswa bermasalah, nilai IP sangat rendah, kedekatan dengan Miras dan kebiasaan membuang waktu sampai larut malam di luar aktivitas belajar. Itulah sebabnya, peraturan DO, berkaitan dengan kekerasan dimensi ketiga: kekerasan structural melembaga, perlu direvisi. Kebijakan DO seharusnya dilakukan bukan karena lamanya masa kuliah mahasiswa (lebih dari 16 semester [8 tahun] untuk Program S1) yang merugikan mahasiswa dan melanggar HAM, karena dilakukan setelah mahasiswa menghabiskan banyak waktu dan dana. Namun DO diterapkan karena nilai IP kumulatif mereka sampai pada 3 – 4 semester kurang dari 2 atau tidak ada nilai B pada 3 – 4 semester.

Pelaksanaan DO diharapkan mampu mengurangi jumlah mahasiswa bermasalah, Pepatah menyatakan 'lebih baik membunuh nyamuk sumber demam berdarah (DBD) daripada membakar kamar tidur karena nyamuk tersebut.' Harus ada keberanian menerapkan kebijakan seimbang antara reward dan punishment kepada mahasiswa dan dosen sehingga mereka yang berprestasi tidak sama dengan mereka yang bobrok. Ini juga adalah factor akar masalah. **